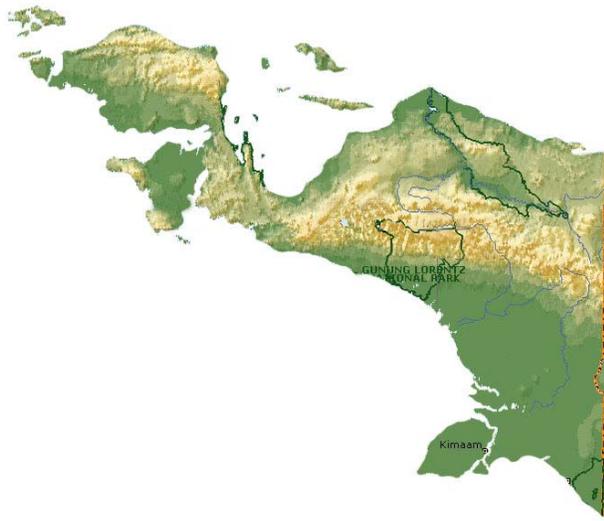


“Tra baku ketemu, jalan masing-masing”

PAPUA AKTUAL 2007

(April - Juni)



Sekilas Informasi

OLEH

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
KEUSKUPAN JAYAPURA

www.hampapua.org

Jayapura

September 2007

DAFTAR ISI

Bagian I : Lintasan Peristiwa April-Juni 2007

- I. Hak-hak Sipil dan Politik
 - A. Kebebasan Warga
 - B. Pertahanan dan Keamanan
 - C. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - D. Penanganan Konflik
 - E. Aspirasi 'M'
 - F. Pemekaran vs Otsus

- II. Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - A. Hak atas Pendidikan
 - B. Hak atas Kesehatan
 - C. Kesejahteraan Umum
 - D. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bagian II : Analisis Peristiwa

- A. Apakah hak hidup orang Papua dilindungi?
- B. Mengontrol dan mengawasi
- C. Pemerintah-pemerintah jalan masing-masing
- D. Konflik tak tertangani
- E. Parahnya tingkat kesejahteraan rakyat

Penutup: tra baku ketemu, jalan masing-masing

Bagian I

LINTASAN PERISTIWA APRIL – JUNI 2007

I. Hak-hak Sipil dan Politik

A. Kebebasan warga (*civil liberties*).

4 April

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM untuk Kasus Wamena meminta agar 6 napi Makar asal Wamena (Papua) yang masih tertinggal di LP Gunung Sari Makassar, untuk dipindahkan ke wilayah hukum Papua, seperti tiga rekan mereka (napi) sebelumnya, yang sudah duluan dipindahkan dan kini ditempatkan di LP Abepura. Alasannya, karena keenam Napi yang masih tinggal di LP Makassar ini dinilai kurang mendapat perhatian dan merasa tersisi di LP Gunung Sari. Adapun 6 napi itu masing-masing, Nubungga Telegen (seumur hidup), Yefray Murib (seumur hidup), Linus Heluka (20 tahun), Apatikelek Lokobal (20 tahun) Mikael Heselo (20 tahun) dan Kimanus Wenda (20 tahun).

13 April

Ketua Komisi F, Weinand Watori, menjelaskan bahwa tiga dari sembilan napi kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Jayawijaya telah dipindahkan dari LP Gunung Sari Makassar ke Abepura. Tiga napi tersebut adalah Yan Hese gem (8 th. Penjara), Herry Asso (10 tahun penjara), dan Gustaf Ayomi (10 tahun penjara).

20 April

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Johnson Panjaitan SH meminta para penegak hukum untuk bersikap adil serta tidak diskriminasi dalam kasus Antonius Wamang, yang didakwa telah melakukan pembunuhan di Timika, Papua pada 2002. PN Jakarta Pusat telah memvonis hukuman seumur hidup terhadap Antonius Wamang, tetapi yang bersangkutan hingga kini tidak pernah diminta keterangan. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan keadilan, sehingga penerapan hukum jadi menyesatkan.

26 April

Kepala Lapas Abepura, John Yarangga, menyatakan bahwa 9 napi positif terinfeksi HIV. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa tidak ada dokter dan perawat kesehatan yang tersedia untuk melayani ratusan napi yang ada.

27 April

Tiga dari sembilan Napi Makar (Sekarang Bukan Lagi Disebut Tapol) asal Wamena (Papua) yang direncanakan dipulangkan ke Papua (Dari Makassar), ternyata sudah tiba di Papua. Sejak tgl. 25 April 2007, ketiganya sudah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Mereka adalah Jean Hese gem (Terpidana 8 Tahun Penjara), Gustav Ayomi (Terpidana 10 tahun Penjara) dan Herry Asso (Terpidana 10 Tahun Penjara). Mereka sengaja dievakuasi ke Papua untuk dibina lebih lanjut. Kedatangan

ketiga Napi Makar yang masa lalunya akibat melakukan penyerangan dan pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Jayawijaya itu, diantar oleh Kasis Registrasi LP Kelas I Makassar, Budi Hartoyo dan tujuh anggota polisi Polda Sulawesi Selatan

1 Mei

Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura, Dra. Sarwita, mengemukakan pendapatnya akan pentingnya Perda Anak dan Perempuan jalanan untuk mencegah penularan penyakit HIV dan AIDS.

2 Mei

Walikota Jayapura, M.R. Kambu, menegaskan bahwa Perda tentang Perempuan dan anak belum perlu dibuat karena jangkauan pelayanannya dinilai belum relevan.

5 Mei

Direktur LBH Jayapura, Paskalis Letsoin, menegaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat 30% per tahun berdasarkan studi kasus LBH.

10 Mei

Saat meresmikan Panitia Rencana Aksi Nasional di Kabupaten Merauke, Sekda Provinsi Papua, Andi Baso Basaleng, menyatakan bahwa masih terdapat pelecehan HAM di Papua akibat perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, kesenjangan sosial, yang diakibatkan oleh kurangnya pengembangan sektor yang menyentuh hak-hak rakyat di Kabupaten Merauke.

13 Mei

Laporan Penyiksaan terhadap Yulius Meage (18 tahun) oleh Sertu Panji Suwito Putro dan Pratu Eduardus Kimbirop di Kurima

Tanggal 13 Mei malam Senin Pukul 19.30 Waktu Papua. Dua anggota TNI Koramil Kurima, Edo dan Panji mendatangi rumah Lewi Meage, orang tua Yulius Meage untuk mencari Yulius Meage, di kampung Holokaga. Pada malam itu juga Lewi bersama ke dua anggota Koramil itu mencari Yulius Meage di kampung Hokoak. Dalam perjalanan, mereka bertemu Yulius. Kemudian kedua anggota KORAMIL, ayah Yulius dan Yulius berjalan menuju ke KORAMIL Distrik Kurima, kurang lebih 1 km. Di sepanjang jalan Lewi dan Yulius dikawal ketat oleh ke dua anggota KORAMIL, Edo dan Panji.

Begitu setibanya di KORAMIL Yulius Meage dibawa Edo menuju salah satu kolam. Lalu ia ditolak ke dalam kolam tersebut dan kepalanya dibenamkan ke dalam air kolam. Edo mengancamnya. Kalau kepala Yulius diangkat, maka ia menembaknya. Ancaman itu membuat Yulius membenamkan kepalanya dalam air kurang lebih selama 2 menit. Setelah itu, Yulius disuruh keluar dari kolam lalu diarahkan ke tiang bendera di depan Kantor KORAMIL. Di sana, ia diikat di bawah tiang bendera selama satu jam. Yulius dijaga ketat oleh pihak KORAMIL dan BATALYON 756 yang selama ini bertugas di Distrik Kurima. Sementara itu Yulius terus di pukuli oleh anggota Batalyon 756.

Yulius terus dipaksa oleh anggota untuk mengaku telah mencuri uang sebesar Rp. 2.370.000.00 (Dua Juta tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Namun korban sendiri mengakui 3 kali bahwa ia mencuri uang hanya sebesar Rp. 320.000.00. (Tiga Ratus dua Pulu Ribu Rupiah). Walaupun sudah ada pengakuan sampai 3, namun ia terus diintimidasi oleh anggota KORAMIL dan dipaksa harus mengaku mencuri uang sebesar Rp. 2.370.000.00 (Dua Juta tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Karena dipaksa dan juga dipukuli terus maka ia mengaku bahwa ia telah mencuri uang tersebut.

Ia dipukuli bertubi-tubi di bagian muka, ditendang bagian kaki dengan sepatu lars oleh anggota KORAMIL dan BATALYON 756. Korban dipukul saling bergantian. Pada saat itu semua Anggota bersepatu lars dan berpakaian lengkap. Korban disuruh angkat mukanya, kemudian mereka menyiram air di bagian hidung dan mulut sekitar 3 menit.

Setelah diikat sejam di tiang bendera, korban pun dilepas dari tiang bendera, lalu dibawa ke rumah Panji Suwito Putro. Korban didampingi oleh dua anggota EDO dan Panji SP. Sesampai di rumah Panji, Yulius mulai diintimidasi oleh ke dua anggota KORAMIL, EDO dan PANJI SP. Kedua tangan dan kaki korban diikat di kursi dengan tali rafia. Kemudian pada malam itu, Panji mengambil korek api dan lilin di kios. Lalu Panji menyalakan lilin. Kemudian Panji membuka celana Yulius dan ia menyuruh Yulius mengeluarkan lidahnya. Kemudian kemaluannya dipegang Panji lalu kemaluannya dibakar. Demikian pula lidahnya dibakar dengan lilin oleh Panji.

Ketika korban mau memasukan lidah Panji mengancamnya. Panji mengatakan "Jangan masukan lidah di ke mulut. Kalau kamu masukan mulut saya akan bunuh kamu". Kemudian Panji menggunakan tang untuk menjempit buah pelir dan lalu ibu jari kaki kanan dan kaki kiri. Sampai sampai saat ini kedua ibu jari Yuius lecet dan hitam karena gumpalan darah mati.

Sesudah itu Yulius diajak tidur beralaskan tripleks dan Yulius menutup badannya dengan kain gorden dengan kaki dan tangannya diikat. Dengan rasa ketakutan, sekitar pukul 24.00(jam 12 malam), ia melarikan diri dari rumahnya Panji. Korban langsung ke kampung Hokoak.

Pada tanggal 16 Mey 2007 Herman Hese gem anggota KORAMIL) bersama Edo dan Siep mengancam orang tua dari korban, Lewi Meage, untuk datang operasi di rumah karena anaknya melarikan diri dari rumah anggota KORAMIL, Panji.

(Sumber: Laporan dari Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Balim Pegunungan Tengah, Mei 2007).

18 Mei

Menanggapi keluhan pungli di LP Abepura, Kepala LP Abepura, John Yarangga, menjelaskan bahwa pungutan bagi keluarga yang mau menjenguk napi di atas jam berkunjung merupakan inisiatif keluarga sendiri. Tetapi jika pada saat jam besuk (9.00-13.00) pihaknya menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi.

30 Mei

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Heribertus Silubun SH, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan perwakilan masyarakat Kimaam dan SKP KAM mengenai hilangnya 2 orang warga di Kimaam dan persoalan lainnya yang terjadi di Pantai Barat Kimaam khususnya peristiwa Kontuwar yang terjadi 12 April 2007 lalu.

7 Juni

Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua, Septer Manufandu, menyambut baik rencana kedatangan Hina Jilani dan telah menyiapkan sejumlah data mengenai ancaman bagi pekerja HAM di Papua.

8 Juni

Wakil Khusus Sekjen PBB, Ibu Hina Jilani, tiba di Jayapura sebagai bagian dari kunjungan sehari guna melihat keadaan para pembela HAM di Papua. Kunjungan ini disambut dengan aksi penyambutan di Bandara Sentani dan di depan Swissbel Hotel oleh kelompok mahasiswa yang membentangkan spanduk penyambutan bertuliskan 'Welcome Mrs. Hina Jilani who carry freedom for all the West Papua', 'Stop Genocide of

the Papua, 'Stop killing in West Papua'. Koordinator aksi demo, Bukhtar Tabuni, menyerahkan laporan yang diterima oleh Ibu Hina Jilani.

Ibu Hina Jilani selain bertemu dengan kalangan pejabat negara di Papua juga berkesempatan bertemu dengan pemimpin agama di kantor Keuskupan Jayapura dan dengan kalangan non-pemerintah di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua dalam pertemuan tertutup. Dalam dua pertemuan ini wakil-wakil masyarakat menyampaikan kesaksiannya secara lisan dan tertulis kepada Utusan Khusus.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal memiliki kepentingan tertentu dengan kunjungan utusan khusus Sekjen PBB yang membidangi masalah Pembela HAM, Hina Jilani, ke Papua, sehingga seluruh komponen masyarakat Papua harus mewaspadainya agar tidak tergadai oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu itu. Hal itu disampaikan wakil para tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), Drs Filep JS Karma di Jayapura.

Sendjung Manulang, Wakil Kepala Kejati Papua, mengungkapkan hasil pertemuan tertutup dengan Hina Jilani dengan mengatakan bahwa informasi mengenai pelanggaran HAM kurang benar karena tidak semua kejadian yang terjadi merupakan perkara HAM. "Mungkin aktivis yang menerima perlakuan menganggap perkara HAM, namun sebenarnya perkara itu bukan masalah HAM". Ditegaskan selama tiga tahun ini pihak Kejati belum menerima kasus pelanggaran HAM.

"Kami akan membuat laporan kasus HAM sesuai hasil diskusi dengan pemerintah dan aparat," kata Wakil khusus Sekjen PBB Jilani. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan membicarakan berbagai kasus HAM di Papua dan keterkaitannya dengan kepolisian, termasuk perlindungan yang diberikan pihak aparat dalam penanganan kasus HAM.

10 Juni

Pengamat Politik UNCEN, Beatus Tambaip, mengharapkan bahwa kunjungan Hina Jilani ke Papua akan mendatangkan penyelesaian persoalan kasus-kasus HAM dan perlindungan para aktivis HAM di Papua secara menyeluruh. Pihaknya menegaskan agar persoalan HAM tidak hanya dilihat dari soal kekerasan dan politik tetapi dilihat secara menyeluruh mencakup juga bidang kesejahteraan, ekonomi, dan budaya.

12 Juni

Guna menanggapi kesimpang-siuran berita, Koalisi Pembela HAM di Papua mengadakan jumpa pers di Sekretariat FOKER LSM Papua. Dalam jumpa pers ini diungkapkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melemparkan tanggung jawab penanganan HAM dari pemerintah ke Wakil Khusus. Selain itu juga ditegaskan mandat wakil Khusus Sekjen PBB Urusan Pembela HAM, Ibu Hina Jilani, yang mencakup: [1] menyelidiki situasi pembela HAM, [2] membangun kerjasama dan dialog dengan pemerintah demi pelaksanaan Deklarasi Pembela HAM 1998 secara efektif, dan [3] memberikan rekomendasi kepada negara untuk melindungi para pembela HAM.

Kepala LP Abepura, John Yarangga, marah dan membantah keras laporan Filep Karma kepada media yang membeberkan kejahatan pemerasan dan kekerasan yang terjadi di LP tersebut sebab dia sudah memberikan perlakuan khusus kepada Filep. Pihaknya juga mendesak gubernur agar status PNS Filep diperiksa kembali.

Sekitar 100 orang warga yang terdiri dari mahasiswa, LSM, korban HAM, dan pemerhati masalah kemanusiaan mengadakan malam peringatan tragedi Wasior 13 Juni 2001 di depan Ruko baru Abepura. Peneas Lokbere selaku koordinator acara menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengenang korban pelanggaran HAM di Wamena, Biak, dan Abepura.

13 Juni

Koalisi HAM mengadakan peringatan peristiwa Wasior di depan Kantor Pos, Abepura. Peringatan ini melibatkan kalangan korban, mahasiswa dan sejumlah lembaga kemanusiaan di Jayapura, seperti Komunitas Korban Abepura, SKP Jayapura, Foker LSM, dan juga lembaga-lembaga negara seperti MRP dan DPRP.

14 Juni

Kepala Kanwil Hukum dan HAM, H. Subechi menanggapi pengaduan Filep Karma tentang kekerasan di LP Abepura dengan menyatakan bahwa jika memang hal tersebut terjadi, pihaknya akan segera menangani. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada bukti konkret seperti dugaan suap dan isu kekerasan itu.

15 Juni

Menurut Asisten II Bidang Aparatur Setda Provinsi Papua, Drs. Hendrik P. Kaisiepo, status kepegawaian Filep Karma seharusnya dihentikan karena menurut ketentuan PNS yang dipidana lebih dari 3 tahun harus diberhentikan; apalagi Filep terkena kasus makar dengan pidana 15 tahun sehingga dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

21 Juni

Kasubdin Bina Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Papua, Drs. Frits Simonapendi, menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua masih tinggi. Data di pihaknya mencatat 976 kasus terjadi di tahun 2006 lalu di 9 kabupaten/ kota.

B. Pertahanan dan keamanan

3 April

Polda Papua menarik 298 senjata api akibat pemegangnya telah habis surat izinnya atau belum dilengkapi dengan tes psikologi. Demikian dijelaskan oleh Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Kartono Wangsadasastra.

6 April

Menyikapi persoalan yang berkaitan dengan masalah pengungsi di perbatasan RI-PNG, Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame, menegaskan, "Penanganan masalah pengungsi merupakan salah satu agenda kerja komisi A dalam kalender kerja anggaran 2007 ini sebagai bentuk keseriusan kami di dewan terhadap masalah perbatasan". Masalah ini perlu ditangani serius agar tidak mengganggu hubungan bilateral antara RI-PNG.

18 April

Polres Boven Digul memeriksa 33 pucuk revolver dan 308 amunisinya. Dari pemeriksaan ini 13 senpi dan 87 amunisi ditarik karena 4 personil tidak lulus tes psikologi, 1 orang habis izin kepemilikan, 5 orang belum mengikuti tes psikologi, dan 3 orang sedang melaksanakan tugas pembinaan.

3 Mei

Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol. Paulus Waterpauw, menjelaskan bahwa empat dari lima anggota DPRD Puncak Jaya telah diizinkan oleh Gubernur untuk diperiksa dalam kaitan dengan kasus pembakaran kantor DPRD di Mulia. Mereka adalah Alus Murib, Terianus Kuluwa, Iskarandar Tabuni, dan Barnabas Samori. Satu orang yang belum mendapatkan izin adalah David Onggomong.

4 Mei

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwino mengatakan, pergantian Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irjen Bachrumsyah Kasman dan Kapolda Papua Irjen Tommy Trider Jacobus telah mendapatkan persetujuan para gubernur setempat. "Persetujuan gubernur sudah ada. Kalau belum ada persetujuan, mana mungkin mereka diganti," kata Sisno di Mabes Polri. Sesuai UU, pergantian kapolda di wilayah yang mendapatkan otonomi khusus harus mendapatkan persetujuan gubernur setempat. Sisno mengatakan, dua kapolda itu diganti karena telah memasuki masa pensiun. "Lagi pula, mereka kan sudah diperpanjang setahun. Masa mau diperpanjang lagi, ya diganti," katanya.

9 Mei

Kapolda Papua, Brigjen Pol. Max Donal Aer, menilai OPM masih menjadi salah satu ancaman gangguan keamanan di Papua. Polisi juga mengaku kesulitan untuk memilah pelaku gerakan yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "OPM kami hadapi dengan persuasif. Salah satunya dengan menggelar perpolisian masyarakat. OPM itu ancaman nyata kendati persenjataan mereka tidak cukup kuat". Selain OPM, yang dinilai merupakan masalah yang dihadapi adalah *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan narkoba.

11 Mei

Danrem 172/ PWY, Kol. Kav. Burhanudin Siagian, mengatakan bahwa musuh negara yang utama adalah para pengkhianat bangsa yakni mereka yang sudah menikmati fasilitas negara; namun masih terus melakukan aksi-aksi merongrong NKRI. Orang-orang seperti itu adalah musuh yang harus ditumpas.

14 Mei

Pergantian di jajaran Polda Papua dilakukan di Mapolda Papua, Jayapura, oleh Kapolda Brigjen Pol. Max Donal Aer. Pergantian itu mencakup Kasat Brimod dari Kombes Pol. Irwanto kepada AKBP Drs. I Made Wira Wibawa (mantan Komandan Satgas Amole II), Kapolres Persiapan Puncak Jaya dari AKBP Drs. Jakobus Marjuki kepada AKBP Hot Raja Tondang (mantan Kasubid Profesi Bidang Propam Polda Papua), dan Kapolres Manokwari AKBP Drs. Petrus Waine (yang diangkat sebagai Wadireskrim Polda Papua) kepada AKBP Drs. Jakobus Marjuki.

15 Mei

Konsul RI di KBRI Port Moresby, Pratito Soeharyo, menjelaskan bahwa pemerintah harus merumuskan payung hukum sebagai landasan pelaksanaan repatriasi pengungsi dari PNG ke Indonesia seperti sudah sering terjadi.

16 Mei

Kapolda Brigjen Pol. Max Donal Aer menjelaskan kebijakan barunya yakni penempatan Polwan ke pedalaman sesuai dengan tuntutan kesetaraan gender dan untuk

penanganan kasus-kasus khusus seperti kekerasan anak, kekerasan terhadap rumah tangga, dsb.

20 Mei

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemprov Papua baru saja menandatangani kerjasama dengan Polri untuk program pendidikan polisi bagi putra-putri asli Papua. Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi menyatakan, ini kesempatan baik dan pertama diberikan kepada putra-putri Papua. Program ini didanai dari APBD Papua Barat dan Papua. "Kapolri hanya memberikan satu kali ini saja untuk dapat mendidik bintanga-bintang polisi asli Papua," terangnya. Dijelaskan Gubernur Bram, pendidikan ini dapat menghasilkan bintanga yang memiliki kekhasan khusus guna menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Total jumlah yang diterima cukup besar yakni 1.500 bintanga dan Papua Barat mendapat jatah sepertiganya atau sekitar 500 orang. Yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan ini adalah putra asli Papua dengan klasifikasi, kedua orang tuanya ras Melanesia atau salah satunya Melanesia atau sudah lama dan lahir di tanah Papua. "Kita upayakan bintanga-bintang polisi ini sebanyak 1.500 orang dan akan dididik secara khusus," tandasnya.

21 Mei

Kapolda Papua, Brigjen Pol. Max Donald Aer, mensinyalir bahwa ada pihak yang hendak mengacaukan Papua dengan menaruh benda mirip BOM di SD Yapis dan SD Gembala Baik, Abepura.

22 Mei

Di Hotel Asmat Kamar 16 Merauke, AKP Roni Pasaribu (31) menembak mati Briptu Nur Hidayat (22) dan kemudian bunuh diri dengan menembak mati dirinya sendiri. Penyebabnya diduga karena relasi sesama jenis.

Pdt. Hermann Saud selaku Ketua PGI di Papua menegaskan dukungannya kepada tindakan Kapolda untuk menindak orang-orang dan pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua.

4 Juni

Kepala BIN, Syamsir Siregar, menjelaskan kepada Komisi I DPR-RI bahwa sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing memainkan isu penegakan HAM di Papua untuk kepentingan ekonomi. Sayangnya, propaganda yang dilakukan mereka selalu menjelekkkan institusi pemerintah dan TNI. Komisi 1 (Bidang Pertahanan) DPR yang diketuai oleh Theo L. Sambuaga setuju dengan aksi yang akan dilakukan Badan Intelijen Negara untuk melakukan tindakan anti propaganda secara diam-diam dan dilakukan dengan teknik intelijen.

6 Juni

Wakil Ketua Komisi A DPRP, Ramses Wally, menanggapi pernyataan Kepala BIN mengenai LSM Asing dengan menyatakan bahwa pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap LSM itu kalau memang benar ada LSM yang mengganggu wibawa bangsa dan menjual isu Papua. "Pemerintah bisa mengambil jalur hukum untuk menindak hal-hal semacam itu, jangan hanya bicara ada LSM begini, tetapi tidak ditindaklanjuti".

7 Juni

Sekda Papua, Tedjo Suprpto, menyatakan tidak tahu banyak mengenai LSM asing yang menjual isu Papua. Pihaknya mengaku bahwa kabar itu belum jelas dan pihaknya belum menemukan LSM yang terkait dengan isu tersebut.

13 Juni

Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Djoenso, membantah dugaan bahwa penemuan 627 butir amunisi jenis senjata mouser panjang berkaitan dengan kegiatan terorisme. "Itu tidak ada kaitannya dengan teroris sebab amunisi itu ditemukan dari dasar laut dan kemudian diserahkan ke polisi". Amunisi itu ditemukan di Pulau Wawadhe di Pantai Timur dan kemudian diserahkan ke Jayapura.

15 Juni

Atase Pertahanan Kedutaan Besar Singapura di Indonesia, Kolonel Wong bersama stafnya Kapten Stenly, melakukan kunjungan kehormatan ke Mapolda Papua. Dalam kunjungan ini, Kolonel Stenly disambut oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs FR. Andi Lolo, SH, MM dengan didampingi Kasat Brimob AKBP Drs I Made Wira Wibawa, SH dan pejabat lainnya.

25 Juni

Dalam apel gabungan TNI dan Polri di jajaran Garnizum Jayapura, Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Djoenso, meminta agar TNI dan Polri di jajarannya menghindari sikap arogan dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mencemarkan nama baik kesatuan maupun institusi.

27 Juni

Menlu Hasan Wirayuda menjelaskan soal rencana kedatangan anggota Konggres AS, Eni Faleomavaega, ke Papua dengan mengatakan bahwa rencana tersebut sedang dibahas dan belum ada keputusan. Pihaknya menyatakan bahwa kedatangan Eni ke Papua justru akan meminimalisir komentar miring tentang kebijakan Pemerintah Indonesia.

28 Juni

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid menilai rencana kunjungan Anggota Konggres AS dari Partai Demokrat, Eni Faleomavega ke Papua dalam agenda kunjungannya ke Indonesia adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Sebab, Indonesia adalah bagian dari organisasi dunia internasional seperti PBB. Selain itu, secara *de facto* kondisi tentang masalah politik Papua memang ada. "Saya kira kunjungan itu tidak perlu ditakuti dan itu wajar-wajar saja. Sebab secara *de facto* ada masalah di Papua, sehingga perlu dilihat secara jelas,"

C. Penyelenggaraan Pemerintahan

2 April

Menanggapi rencana Gubernur Bas Suebu untuk melakukan tes pengangkatan pegawai eselon II, III, IV, Wakil Direktur *Institute for Civil Strengthening*, Bambang Sugiono, dan Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame, menyatakan dukungan dan berharap itu bukan hanya retorika.

Ketua Bappeda Tolikara, Befa Jigibalom, menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Tolikara tahun 2007 sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Tolikara sebesar Rp. 458 milyar. 75% dana akan dialokasikan ke belanja publik terutama empat prioritas menurut UU 21/2001 tentang Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur kampung.

Pemerhati Pembangunan Waropen, Engelbertus Kaiway, mendesak agar pihak eksekutif segera menyerahkan RAPBD tahun 2007 kepada pihak legislatif. Menurutnya, keterlambatan ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan pihak eksekutif dalam menerjemahkan Permendagri No. 13/2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007 yang menganut sistem anggaran berbasis kinerja.

25 orang pemuda yang mengaku dari masyarakat Grime Nawa melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Jayapura dipimpin oleh Sekretaris Dewan Adat Grime Nawa, Oktovianus Samon. Unjuk rasa bertujuan mempertanyakan keseriusan dari dewan dalam menyikapi aspirasi pembentukan Kabupaten Grime Nawa. Ketua DPRP Jayapura, Yohanes Eluay, menyatakan bahwa pihak dewan akan membahas dalam sidang paripurna tgl. 10 April.

4 April

Musrembang Kabupaten Jayawijaya dibuka oleh Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom, di Sasana Wio, Wamena. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana pembangunan, juga mensinergikan program kampung, distrik, dan dinas.

Pleno KPUD Kabupaten Puncak Jaya menetapkan pasangan Lukas Enembe dan Henock Ibo sebagai pemenang bupati dan wakil bupati terpilih periode 2007-2012 dengan suara 54.929 suara (59%). Urutan kedua adalah pasangan Elisesser Renmaur-Daniel Wakerkwa: 20.579 (22%) dan urutan ketiga adalah pasangan Elvis Tabuni dan Paul Tabuni: 17.538 (19%).

10 April

Sidang Istimewa DPRD Kabupaten Jayapura yang akan membahas pembentukan/ pemekaran Kabupaten Grime Nawa batal karena adanya aksi demo kelompok pro dan kontra tentang pemekaran Grime Nawa.

11 April

Sehubungan dengan penanganan berkas korupsi wakil rakyat DPRD Jayawijaya periode 1999/2004, Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw, menjelaskan, "Pada tgl. 8 April ketiga berkas yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap itu telah kita kirim kembali ke kejaksanaan. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan para tersangkanya bisa segera diproses di pengadilan".

14 April

Bupati Biak, Yusuf Melianus Maryen, menegaskan kepada jajarannya untuk memperhatikan penyiapan materi RAPBD tahun 2008 agar tidak terlambat mengingat ada sanksi pemotongan DAU oleh pemerintah pusat.

17 April

Dalam Musrembang Bupati dan Walikota se-Tanah Papua di Biak, Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, H. Ahmad Hatari, mengungkapkan bahwa baru 5

kabupaten yang telah menyelesaikan APBD, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Tolikara. Sementara 15 kabupaten belum membahas RAPBD.

Sekda Papua, Andi Basso Basaleng, mengungkapkan bahwa plafon RAPBD Provinsi Papua 2008 akan meningkat mengingat usulan program 2008 mencapai Rp. 36.557.046.919.276,- (Rp. 36 triliun lebih). Usulan itu datang dari 1.813 program yang dibagi dalam tiga bidang: [1] bidang sosial budaya Rp. 4.275.842.499.800 untuk 806 program, [2] bidang ekonomi sebesar Rp. 1.737.272.741.000 untuk 590 program, dan [3] bidang fisik dan prasarana sebesar Rp. 29.753.823.037.472 untuk 375 program.

23 April

Pimpinan DPRD Mimika dikukuhkan dalam sidang paripurna DPRD Mimika oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika. Ketua DPRD adalah Yopi Kilangin sementara wakilnya adalah Stef Rahangiar dan Pdt. Paulus Pakage.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH, menyerahkan APBD yang ditetapkan dalam Perda No. 7/2007 yang disebut sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kepada instansi jajarannya. APBD Papua ini bernilai Rp. 5.780.492.704.196,-

24 April

Wakil Bupati Merauke, Drs. Waryoto, menjelaskan rencana Pemkab Merauke untuk membeli satu unit pesawat Boeing 737 seri 300 dengan anggaran sebesar Rp. 100 miliar dalam RAPBD 2007. Pesawat Kli yang sekarang beroperasi telah menyumbang PAD sebesar Rp. 63,847 miliar.

25 April

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Drs. Paulus Waterpauw, menegaskan, untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di DPRD Jayawijaya periode 1999/2004 yang proses penyidikannya dijadikan empat berkas, maka penyidik Polda Papua berencana akan memanggil lagi mantan Ketua DPRD Jayawijaya, John Tabo, dengan disertai surat perintah membawa. "Karena yang bersangkutan (John Tabo) tidak hadir lagi dan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga kami akan memanggil lagi dengan disertai surat perintah membawa".

Menanggapi rencana pemekaran Kabupaten Jayapura, Ketua Dewan Adat Suku Yokari, Yosias Kiorway, menegaskan, "Masyarakat adat Yokari yang ada di 5 kampung, 100% minta untuk tetap berada di wilayah Kabupaten Jayapura". Alasan penolakan bergabung dengan calon Kabupaten Grime Nawa adalah karena selama ini pihaknya tidak pernah dimintai pendapat.

Bupati Jayapura, Habel Suwae, menjelaskan kepada DPRD Jayapura agar memperhatikan juga aspirasi kontra terhadap rencana pemekaran wilayah Grime Nawa selain aspirasi pro.

Ketua DPRD Kabupaten Supiori, Otto Albert Msen, mengaku bahwa pihaknya belum menerima materi RAPBD 2007 dari pihak eksekutif. Keterlambatan untuk memenuhi tenggat waktu 30 April dari Depdagri akan bermuara pada sanksi pemotongan DAU oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemkab melobi Departemen Keuangan agar hal ini tidak terjadi.

26 April

Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobs menegaskan praktik uang dalam penyidikan harus dihentikan.

Setelah diadakan pembahasan selama tiga hari berturut-turut mengenai usulan calon Kabupaten Grime Nawa, lima fraksi DPRD Kabupaten Jayapura menolak usulan pihak eksekutif. Lima fraksi tersebut adalah Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi Kebangkitan Demokrasi, dan Fraksi Keadilan Sosial. Alasan yang dikemukakan umumnya berfokus pada suasana pro dan kontra yang mewarnai proses pembagian wilayah tersebut.

Kapolda Papua menegaskan bahwa permintaan mantan Bupati David Hubi untuk menghentikan proses penyidikan terhadap mantan anggota DPRD Jayawijaya 1999-2004 tidak memiliki dasar hukum. Mengenai keberatan terhadap pemeriksaan Bupati John Tabo, Kapolda mengacu pada surat dari Mabes Polri yang dikirim tgl. 16 Januari 2007 dan telah diterima tgl. 17 Januari 2007. Menurut UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 36 ay. 1, pemeriksaan tersebut memang harus atas izin presiden. Tetapi ay. 2 menyatakan bahwa setelah 60 hari tidak ada jawaban dari Presiden, penyidik dapat melanjutkan penyidikan maupun penyelidikan.

27 April

DPRD Kabupaten Nabire menyetujui dan mensahkan RAPBD Kabupaten Nabire sebesar Rp 545.718.564.500. Dana tersebut berasal dari DAU sebesar 402.255.000,- DAK sebesar Rp. 663.000.000, Dana Otsus Rp. 55.740.709.000,- dan PAD Rp. 5.515.572.000,-

Bupati Sentani, Habel Suwae, menjelaskan bahwa tahun ini alokasi dana untuk setiap kampung meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya Rp. 75 juta per kampung/ th sekarang menjadi Rp. 200 juta. Dana tersebut difokuskan untuk menunjang fungsi kepemimpinan dan manajerial tingkat distrik. Total dana yang dialokasikan adalah Rp. 20.460.000.000 dengan perincian: Wilayah Pembangunan I (Sentani Timur-Sentani Barat) sebesar Rp. 121.586.000,- WP II (Depapre, Demta Yokari, Ravenirara) sebesar Rp. 143.172.000,- WP III (Grime) sebesar Rp. 147.745.000,- dan WP IV (Nawa) sebesar Rp. 162.600.000,-

Sehubungan dengan dugaan korupsi anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004, Bupati Tolikara, John Tabo, yang juga mantan anggota DPRD tersebut menyatakan bahwa dirinya merasa dipojokkan dan diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian melalui media massa yang menyatakan dirinya akan dijemput paksa. Pihaknya menegaskan bahwa siap diperiksa asalkan sudah ada izin dari Presiden dan siap menaati hukum.

28 April

DPRD Kabupaten Merauke menyetujui RAPBD Kabupaten Merauke sebesar Rp. 957,956 miliar lebih. Lembaga ini juga mengeluarkan SK tentang Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang mencakup Boven Digul, Asmat, Mappi, dan Merauke. SK dikeluarkan atas dasar pertimbangan memperpendek rentang kendali, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

29 April

Mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004, Didimus Yahuli SH, menyatakan bahwa dana non-bujeter sebesar Rp. 170 juta yang diberikan oleh Bupati David Hubi kepada anggota DPRD waktu itu bukan merupakan korupsi. "David Hubi tidak merasa rugi dan diteror oleh anggota dewan. Dana juga tidak diambil dari pasal proyek yang menyebabkan terjadinya proyek fiktif tapi kok dibilang korupsi".

30 April

Kapolda Tommy Jakobus menanggapi berbagai komentar terhadap pemeriksaan korupsi mantan anggota DPRD Jayawijaya dengan menegaskan bahwa pernyataan tersebut perlu dibuktikan di pengadilan.

1 Mei

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolikara, Stev Kogoya, menilai bahwa penyelidikan korupsi mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004 lebih bermuatan politis tanpa memahami kondisi politis yang terjadi saat itu.

Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Marwan Jakfar, menjelaskan bahwa pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp. 271 milyar untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

3 Mei

Sekitar 200-an orang dari empat kampung di perbatasan Biak dan Supiori mendatangi Gedung DPRD Biak Numfor guna menyampaikan penolakan mereka untuk bergabung dengan Kabupaten Biak. Kampung tersebut adalah Waryesi Mansoben, Doubo, Syurdori, dan Duber.

5 Mei

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Papua, M. Mayor, menjelaskan bahwa 11 kabupaten belum memiliki kantor Depag antara lain Keerom, Supiori, Boven Digul, Asmat, Puncak Jaya.

6 Mei

Pdt. Rumsarwir, anggota MRP dari Pokja Agama, menjelaskan bahwa MRP akan mengusulkan draf perdasus larangan peredaran miras akibat dampak buruk konsumsi alkohol yang terjadi selama ini di Papua.

7 Mei

Sekda Kabupaten Jayawijaya, Chris Wopari, mengatakan kepada kepala dinas/ badan menyerahkan dokumen DIPA senilai Rp. 583.421.381.377. Anggaran tertinggi dialokasikan ke Dinas P dan K sebesar Rp. 112.131.538.269,- kemudian Dinas Pemukiman senilai Rp. 101.405.501.682,- dan urutan ketiga adalah Dinas Kesehatan sebesar Rp. 44.389.318.189,-

8 Mei

Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Ahmad Hatari, menegaskan bahwa rencana pendirian Metro Papua tetap berjalan dan harus sukses dengan dana sebesar Rp. 20 milyar. Dana tersebut akan disalurkan melalui BIKDA.

Bupati Supiori mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya terancam kena sanksi pemotongan DAU sebesar 25% karena terlambat menyusun dan membahas RAPBD 2007. Untuk itu pihaknya telah menyurati Pemerintah Pusat.

9 Mei

Gubernur Barnabas Suebu mengungkapkan bahwa Pemprov mengalokasikan Rp. 411,4 milyar untuk program RESPEK. Dana tersebut diperoleh dari Dana Otsus Papua 2007 yang berasal dari 2% DAU.

Direktur ICS, Budi Setyanto, menilai rencana Pemprov Papua untuk memberikan bantuan Rp. 20 milyar kepada Metro TV Papua berlebihan. Selain itu rencana tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa Pemprov tidak memahami penyelenggaraan penyiaran seperti diatur dalam UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 11/ 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

10 Mei

Kabikda Papua membantah bahwa Metro Papua mendapat dana sebesar Rp. 20 milyar. Pihaknya menegaskan bahwa yang benar adalah Pemda mengalokasikan dana sebesar Rp. 5 milyar untuk Tivi Media Papua yang adalah BUMD. Metro Papua berada di bawah PT. Tivi Media Papua yang merupakan salah satu anak perusahaan PD Irian Bhakti.

11 Mei

Direktur Utama PD Irian Bakti, Domi Sukamto, menjelaskan bahwa akta pendirian Metro TV Papua sedang diurus di Departemen Kehakiman Jakarta. Menurutnya TV Metro Papua bersifat murni swasta tetapi pihaknya tidak mampu menjelaskan status dana Rp. 20 milyar yang disalurkan dari BIKDA juga mekanisme pengelolaan dana tersebut.

12 Mei

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Ahmad Hatari, menyerukan kepada bupati dan walikota agar melakukan efisiensi keuangan sehingga dana operasional Kepala Daerah tidak boleh lebih dari 4% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

14 Mei

Wakil Ketua Komisi A DPRD, Ramses Wally, menyatakan bahwa APBD Papua 2007 cacat hukum sebab terjadi pemangkasan yang sangat besar sesudah APBD itu disahkan oleh rapat paripurna DPRD. Misalnya saja dana operasional dewan sebesar Rp. 195 milyar dipangkas menjadi Rp. 115 milyar.

Walikota Jayapura, MR Kambu, menanggapi pernyataan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, Ahmad Hatari SE, dengan menyatakan bahwa pihaknya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya justru menegaskan agar hal itu juga diberlakukan untuk semua komponen pembiayaan seperti dana perjalanan, honor-honor, dan belanja rutin.

17 Mei

Direktur Utama PT Televisi Mandiri Papua, France Jasman, Direktur Metro Papua, Mathias Refra, dan Kabikda, Fred Manufandu, menegaskan bahwa legalitas Metro Papua dianggap selesai dan akan diluncurkan pada minggu berikutnya. Dana yang diberikan oleh Pemda Papua sebesar Rp. 20 milyar dinyatakan sebagai penyertaan modal dan hal itu dipilih karena TVRI terbelit berbagai masalah internal.

21 Mei

APBD Yahukimo akhirnya ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Yahukimo sebesar Rp. 528 milyar yang terdiri dari DAU sebesar Rp. 356 milyar, DAK Rp. 47,8 milyar, Dana Otsus Rp. 64 milyar, dan dana penyesuaian Rp. 25 milyar.

23 Mei

Anggota Dewan Kehormatan DPRD, Piet H. Awangkok, mengakui bahwa Ramses Wali dipanggil oleh Dewan Kehormatan DPRD karena telah membeberkan APBD Papua 2007 yang dinilai cacat hukum.

28 Mei

Sekda Tedjo Suprpto menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan edaran bagi pejabat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) seperti diminta oleh Wakil Ketua KPK, Sjahrudin Rasul.

29 Mei

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, Ikram Baasalem, memastikan bahwa sidang LPKJ Walikota Jayapura akan dilaksanakan pada bulan Juni.

17 pemuda yang tergabung dalam Gerakan Moral Masyarakat Waropen (Germowar) dipimpin oleh Dorus Wakum melakukan aksi demo di Kejati Papua guna menuntut agar kasus korupsi di Pemda Waropen sebesar Rp. 11.048.823.637 ditangani secara serius. Dalam kasus ini diindikasikan Bupati Waropen Ones Ramandey terlibat sesuai dengan Surat Gubernur tgl. 28 September 2005.

2 Juni

Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Supiori, Chaidir Massing, mengungkapkan kekesalan mereka atas tindakan pemda Supiori yang mengubah APBD 2007 tanpa koordinasi dengan DPRD Supiori. Oleh karenanya Panitia Anggaran menyatakan penolakan dan pihak DPRD akan melakukan tindakan tegas terhadap hal ini.

6 Juni

Dalam Turkam di Supiori Gubernur Papua Barnabas Suebu menjanjikan, "Pejabat eselon II yang bertugas di wilayah pemerintah distrik terpencil itu menjadi perhatian saya. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam hal ini gaji yang diterimanya itu melebihi atau 2 kali lipat dari gaji kepala dinas yang bertugas di kota dan provinsi". Hal itu juga berlaku bagi anak-anak mereka yang akan mendapatkan beasiswa.

13 Juni

Untuk kedua kalinya sidang LKPJ Walikota karena APBD 2006 sedang diaudit oleh BPK Jayapura. Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Hermes Hein Ohee, menjelaskan bahwa menurut Sekda Kota Jayapura proses audit baru akan selesai akhir Juli.

14 Juni

Wakil Ketua II DPRD, Paskalis Kossay, menanggapi positif tawaran Gubernur Barnabas Suebu untuk melipatgandakan gaji PNS dan eselon II di pedalaman karena dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di pedalaman.

ICW melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang jenis DHC 6-300 Twin Otter antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan PT Air Regional senilai

Rp. 12 milyar tahun 2002 kepada KPK di Jakarta. Pengadaan ini di luar alokasi APBD sehingga pembiayaan diambil dari dana bantuan subsidi angkutan 9 bahan pokok.

20 Juni

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Johannes K.H. Roembiak, menegaskan bahwa keberatan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya Elpius Tabuni dan Paulus Tabuni serta Elieser Renmaur-Daniel Wakerkwa untuk menunda pelantikan bupati terpilih Puncak Jaya, tidak dapat diterima. Alasannya adalah radiogram Mendagri telah menetapkan pelantikan tersebut dan sudah ada keputusan dari pengadilan tinggi.

28 Juni

Lukas Enembe dan Henock Ibo dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012 di Mulia oleh Gubernur Barnabas Suebu berdasarkan SK Mendagri Widodo AS No. 131.91.253/2007. Enembe berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian dan menekan harga supaya lebih murah di Puncak Jaya.

29 Juni

Kajari Manokwari, Djoko Isworo SH, mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan kejaksaan negeri Manokwari ditemukan penyimpangan APBD Kabupaten Teluk Wondama tahun 2004 senilai Rp. 10-20 milyar. Dana tersebut dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengawasan Daerah.

D. Penanganan konflik

1 April

Ketua Sinode GKII Kingmi, Pdt. Seblum Karubaba, menyatakan tetap bersedia menempuh jalur damai guna menyelesaikan konflik internal dengan Pengurus Wilayah GKII. "Memang pihak GKII menolak untuk berdamai, namun kami melalui kuasa hukum tetap memakai jalur damai. Papua adalah tanah damai dan juga pihaknya maupun GKII merupakan anak Tuhan yang tidak perlu terlibat dalam konflik". Pihaknya menjelaskan bahwa perubahan dari GKII ke KINGMI didasarkan atas AD/ ART pasal 119 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa gereja wilayah yang ada di pemerintahan khusus, berwenang untuk memakai nama sinode untuk wilayah provinsi dan klasis untuk kota/kabupaten.

2 April

Ketua GKII Daerah Pantai, Pdt. Petrus Bonyadone, menjelaskan bahwa upaya damai yang telah dilakukan untuk menangani konflik internal antara pengurus Sinode GKII dengan pengurus Wilayah GKII melalui Kanwil Departemen Agama. "Sebenarnya upaya damai itu sudah ditawarkan dari dulu dan memang kami ingin agar perselisihan ini tidak dibawa ke pengadilan tapi diselesaikan secara intern tapi tidak ada penyelesaian. Maka dengan terpaksa harus diselesaikan lewat pengadilan.

4 April

Calon Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu saat diadakan perhitungan suara Pilkada Puncak Jaya pada hari tersebut oleh KPUD Puncak Jaya.

5 April

Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berlaku lebih dari lima tahun. Namun, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dijanjikan dalam UU tersebut hingga kini tak juga terwujud. Bahkan, janji untuk itu sepertinya kian terlupakan dari agenda nasional maupun daerah. Menurut Amiruddin A Wahab dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), terlupakannya agenda KKR Papua dari pemerintah pusat tidak terlepas dari lalainya unsur pemerintah di Papua. DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Gubernur Papua seharusnya segera mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Ini sesuai Pasal 46 Ayat (3) UU No 21 Tahun 2001 yang menyebutkan susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas, dan pembiayaan KKR diatur dengan Keppres setelah mendapat usulan dari Gubernur.

10 April

Wagub Papua, Alex Hesegem, membuka Mukhtamar I Majelis Muslim Papua di GOR Cenderawasih Jayapura. Dalam sambutannya Wagub menegaskan agar Papua tetap damai untuk siapa saja.

Pasangan Elieser Renmaur dan Daniel Wakerkwa serta pasangan Elvis Tabuni dan Paul Tabuni resmi mengajukan gugatan terhadap KPUD Puncak Jaya di Pengadilan Tinggi Jayapura. Pengaduan didampingi oleh pengacara masing-masing, yakni Rahman Ramli SH, Sihar Tobing SH, dan Jemy Noya SH, untuk pasangan Eliser-Daniel, serta John Richard SH dan Paskalis Letsoin SH untuk Elvis-Paul.

13 April

Ketua Koalisi Cinta Daerah, Neno Tabuni S.Sos, dan Koalisi Puncak Jaya Bersatu, sejumlah anggota LMA Puncak Jaya mendesak KPUD Provinsi Papua dan Pengadilan Tinggi agar bertindak proaktif dalam menangani konflik pilkada di Puncak Jaya.

Mukhtamar I Majelis Muslim Papua berhasil memilih H. Arobi Aituarauw selaku Ketua MMP periode 2007-2011. Pada kesempatan tersebut dikeluarkan 7 rekomendasi di berbagai bidang antara lain: bidang demokrasi dan politik, bidang sosial budaya, dan bidang hukum dan HAM.

18 April

Philipus Wakerkwa, salah satu calon Ketua DPRD Mimika yang menggugat keabsahan Pimpinan DPRD Mimika, menjelaskan proses pemilihan Pimpinan yang berlangsung tgl. 13 Maret 2007 dinilai cacat hukum. Alasannya tata pemilihan bertentangan dengan PP No. 25 tahun 2004 yakni SK yang dikeluarkan hanya ditandatangani oleh staf biro hukum dengan stempel setda padahal seharusnya ditandatangani gubernur atau Kepala Biro Hukum Provinsi Papua dan cap garuda.

Sidang gugatan terhadap hasil perhitungan suara Pilkada Puncak Jaya 4 April 2007 digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Tinggi Jayapura. Pemohon adalah pasangan Elvis Tabuni dan Paulus Tabuni dan pasangan Elieser Renmaur dan Daniel Wakerkwa; sedangkan termohon adalah KPUD Puncak Jaya. Persoalan berfokus pada dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan pasangan Lukas Enembe dan Henock Ibo.

20 April

Warga suku Wolani terlibat baku panah dengan warga suku Ekari/Mee. Sedikitnya, belasan orang dari kedua suku harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena busur. Perang suku tersebut berawal dari kasus Lakalantas yang menewaskan salah seorang Pemuda dari Suku Wolani, Yunus, yang terjadi beberapa waktu lalu di Kali Bobo. Atas tewasnya Yunus itu, pihak keluarga suku Wolani minta denda besar Rp 5 miliar kepada tersangka kasus laka lantas yang notabene dari suku Ekari/Mee. Agar tak menimbulkan masalah baru, maka kasus Lakalantas yang berbuntut permintaan uang denda sebesar Rp 5 miliar itu ditangani oleh Kepala Suku Mee secara adat, dalam arti Suku Mee harus membayar kepala korban.

23 April

Kedua suku yang bertikai sepakat mengadakan perdamaian disaksikan oleh Bupati Nabire, Polres Nabire, dan berbagai pihak lainnya. Kedua suku sepakat untuk menepati janji kesepakatan ganti rugi, yakni sebesar Rp. 185 juta dan 6 ekor babi yang akan dibayarkan oleh Suku Mee.

25 April

Para Pemimpin Agama di Papua memilih dan menetapkan Pdt. Hermann Saud M.Th, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama.

2 Mei

Pengadilan Tinggi Papua memenangkan KPUD Puncak Jaya atas gugatan yang diajukan oleh pasangan Calon Bupati Elieser Renmaur-Daniel Wakerwa dan calon bupati Elvis Tabuni-Paul Tabuni. Atas kemenangan ini pihak penggugat diwajibkan membayar ongkos perkara Rp. 200.000,- Karena itu pihak KPUD Puncak Jaya akan segera bersidang pleno untuk mengajukan usulan pelantikan kepada gubernur.

4 Mei

Terjadi pemalangan di tiga tempat di Kantor DPRD Manokwari, Kantor Golkar Provinsi Papua Barat, dan ruang kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Daud Mandowen, oleh kelompok pendukung Yulianus Dowansiba. Mereka menuntut agar penggantian antar waktu anggota DPRD dari Golkar segera dilaksanakan.

6 Mei

Perkelahian antar kampung Skori dan Kampung Babrongko dan Yoboi di Distrik Kemtuk ditangani oleh Polres Jayapura. Kapolres AKBP Drs. Didi Suprihadi Yasmin, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil ondoafi kedua belah pihak dan telah menyepakati perdamaian.

7 Mei

Palang di Kantor DPRD Kabupaten Manokwari dibuka oleh kelompok pro Yulianus Dowansiba, kader partai Golkar, sementara palang di kantor Golkar Papua Barat belum dilepas. Pemalangan terkait dengan konflik intern Golkar.

14 Mei

Terjadi bentrokan antara pendukung pengurus GKII Wilayah dan pengurus GKII Sinode di Kantor Sinode GKII (Kingmi) Jl. Samratulangi No. 13 Jayapura. Sejumlah orang menjadi korban bentrokan antara lain Pdt. Albert Keiya yang terluka parah di kepalanya akibat serangan 'kelompok wilayah' dan dilarikan ke RSUD Dok II. Juga Uti dan Yeimo.

Bentrokan berhasil dihentikan oleh pihak Polresta Jayapura yang kemudian mengosongkan lokasi kompleks kantor Sinode GKII hingga ada putusan final dari pengadilan.

15 Mei

Pendukung 'kelompok Sinode GKII (Kingmi)' yang berjumlah sekitar 100-an orang melakukan aksi demo damai di depan kantor Sinode GKII di Jl. Samratulangi 13, Jayapura, akibat aksi hari sebelumnya. Mereka menuntut agar gedung tersebut diberikan oleh polisi kepada mereka.

Ketua Koalisi Puncak Jaya Bersatu, Alus Murib, didampingi oleh Pieter Eil SH dan Steve Waramori SH, yang mengusung pasangan Elieser Renmaur dan Daniel Wakerkwa menyatakan akan melakukan upaya PK lewat Mahkamah Agung karena ada dua alasan: [1] pemberian surat khusus tertanggal 5 April 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 17 April 2007 no. W30.U/287/HT.01.10/IV/2007 dari KPUD Kabupaten Puncak Jaya kepada Tim Kuasa Hukum atas nama Habel Rumbiak cs adalah tidak sah karena Habel Rumbiak adalah notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 20 April 2006. Lebih lanjut hal itu bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat e yang menegaskan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat. Karena itu surat tersebut dinilai batal demi hukum. [2] putusan Pengadilan Negeri dinilai kedaluwarsa karena sesuai dengan Pasal 94 PP No. 17/ 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan MA memutus sengketa hasil perhitungan suara paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri. Pada kasus Puncak Jaya, pendaftaran keberatan ke Pengadilan Negeri Nabire dilakukan pada tanggal 5 April 2007 sementara putusan baru pada 2 Mei sehingga Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersifat kedaluwarsa sesuai PP tersebut.

16 Mei

Tim SKP Jayapura yang dipimpin oleh Br. Rudolf Kambayong OFM bersama tim medis RS Dian Harapan melaksanakan kunjungan ke Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, guna melihat dari dekat keadaan 100-an warga yang kembali dari pengungsian di distrik Yapsi, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea.

Pengadilan Tinggi Jayapura memenangkan KPUD Sorong dalam keputusan atas perhitungan suara Pilkada Kabupaten Sorong yang digugat oleh pasangan Ir. Marthinus Salamala dan Suprpto. Penggugat menuduh KPUD menggelembungkan 6.000 suara bagi pasangan Stevanus Malak dan Drs. Tribudiarto dari 13.152 menjadi 19.152 suara.

Kuasa Hukum KPUD Puncak Jaya, Habel Rumbiak SH, menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap menghadapi PK yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan Elieser Renmaur dan Daniel Wakerkwa.

17 Mei

Perundingan antara Pengurus GKII Wilayah dan Pengurus Sinode GKII yang difasilitasi oleh Kapolresta Jayapura, Kanwil Agama Provinsi Papua, Depag Kota Jayapura, dan Pengadilan Negeri Jayapura, mengalami jalan buntu karena kedua pihak bersikukuh pada pendapat masing-masing. Karena itu massa pendukung Sinode GKII melakukan demo damai ke DPR Papua untuk minta penyelesaian.

18 Mei

Dewan Penginjilan OFM mengadakan seminar sehari dengan tema Toleransi dan Keadilan dengan menghadirkan pembicara: Dr. Nico Syukur Dister OFM dan Frederika Korain SH. Seminar tersebut dimaksudkan sebagai upaya membangun dialog antar umat beragama di Jayapura ini, demikian dijelaskan oleh Pastor Willem Warrat OFM selaku panitia.

20 Mei

Kepala Suku Puncak Jaya, Aneb Murib, mengecam keras tindakan ketiga pasangan calon bupati Puncak Jaya yang telah menelantarkan sekitar 900 orang dari Puncak Jaya untuk mendukung proses persidangan di Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 4 April lalu. Mereka dijanjikan untuk dipulangkan setelah sidang ternyata hingga hari ini tetap telantar.

21 Mei

Delapan denominasi Gereja di Kabupaten Yahukimo memperingati hari masuknya Injil ke Yahukimo yang ke-46. Peringatan dipusatkan di Dekai dan diikuti oleh GIDI, GKI, Kingmi, GJPI, Katolik, GPDI, GBI, dan Adven.

Sengketa antara dua badan pengurus GKII akhirnya mencapai kata sepakat untuk kembali ke perjanjian 30 Desember 2006. Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Kanwila Departemen Agama Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Hal ini ditandai juga dengan pembukaan kembali kantor Sinode GKII dan ibadah bersama.

Terjadi sengketa keluarga di Kampung Wandenggobak, Distrik Mulia, karena keluarga Gumega Wonda yang meninggal karena malaria menuduh saudari perempuannya Beri Wonda (40) melakukan guna-guna. Akibatnya Keluarga memarah Beri Wonda dan membakar 11 honai.

22 Mei

Pengurus GKII Wilayah Papua memberikan klarifikasi melalui kuasa hukumnya, Hendrik Tomaso SH, bahwa penandatanganan kesepakatan dengan pengurus Sinode GKII dengan kembali ke perjanjian 30 Desember 2006 dinilai tidak benar. Alasannya kesepakatan itu tidak melalui proses pengadilan.

30 Mei

Ketua DPRD Puncak Jaya, Timotius Murib, mendesak Gubernur Papua agar segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Lukas Enembe dan Henock Ibo berdasarkan SK Pengangkatan Bupati yang telah ditandatangani oleh Mendagri Ad interim Widodo AS pada 28 Mei lalu.

6 Juni

Terjadi tawuran antara mahasiswa Sorong dan mahasiswa Biak di Perumnas III Waena, Jayapura. Dalam tawuran ini dua asrama dan dirusak dan seorang staf UNCEN, Max Kareth terluka serius. Penyebabnya adalah pengeroyokan terhadap Edwin Smas penghuni asrama UNCEN Unit I Perumnas III Waena oleh 6 orang sesama penghuni asrama yang berakibat luka parah. Akibatnya, saudara Edwin melakukan balas dendam ke asrama tersebut. Polsek Abepura dibantu Dalmas Polresta Jayapura segera menangani masalah sehingga tawuran tidak meluas.

11 Juni

Ratusan warga Nabire dipimpin oleh Soemartono melakukan aksi demo damai ke Kantor DPRD Nabire guna menolak Raperda Pilkada Bupati Nabire karena [1] tidak memiliki payung hukum, [2] bersifat diskriminatif terhadap pendatang di Nabire, [3] mengingkari keberadaan warga pendatang sebagai warganegara RI, dan [4] pengebirian hak demokrasi. Pendemo disambut oleh Ketua DPRD Daniel Butu dan Wakil Ketua II, Didimus Waray.

13-14 Juni

Suku-suku di Kwamki Lama, Kabupaten Timika, menggelar acara bakar batu, menandai berakhirnya perang antarsuku, dan dimulainya sebuah kehidupan baru yang aman, damai, dan berkerabat. Ketua Panitia Pembayaran Kepala Kelompok Tengah, Johnny Bulibal mengatakan dana pembayaran kepala yang terkumpul untuk kelompok tengah seluruhnya berjumlah Rp 1 milyar yang diserahkan kepada tujuh keluarga korban yang meninggal saat perang suku Kwamki Lama, 23 Juli-14 September 2006, dimana masing-masing korban menerima Rp 200-Rp 500 juta.

E. Aspirasi 'M'

11 April

Sekjen PDP, Thaha Alhamid, mengungkapkan bahwa PDP akan menemui konggres Amerika Serikat guna menyampaikan masalah Papua. Pokok-pokok pikiran yang mau disampaikan adalah menyangkut sejarah politik Papua 1961-1969, masalah pelanggaran HAM, dan masalah pembangunan yang tidak menyentuh.

12 April

Gubernur Barnabas Suebu ingin mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi niat PDP untuk pergi ke konggres Amerika Serikat. "Saya belum dengar, dalam rangka apa mereka ke sana. Saya ada rencana ketemu mereka. Saya mau dengar dari mereka bagaimana rencana mereka itu? Seperti apa sebenarnya".

13 April

Sekjen PDP, Thaha Alhamid, menyambut positif ajakan gubernur Barnabas Suebu untuk membicarakan rencana kunjungan delegasi PDP ke Konggres Amerika Serikat. Namun pihaknya menjelaskan bahwa hanya masalah pembangunan yang dapat diselesaikan di dalam negeri, sementara masalah pelurusan sejarah termasuk PEPERA adalah masalah internasional sehingga hanya bisa diselesaikan di tingkat internasional.

23 April

Pejabat Duta Besar Amerika untuk Indonesia John M. Heffern menyatakan usai pertemuan tertutup dengan Gubernur Barnabas Suebu. "Tentu saja Pemerintah Amerika Serikat mendukung integritas teritorial dari Indonesia pada saat yang sama dan posisi Papua di dalam Indonesia," katanya singkat. Terkait dengan rencana PDP (Presidium Dewan Papua) yang membawa beberapa masalah Papua ke Konggres negara adidaya itu antara lain menyangkut penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM dan pelurusan sejarah Papua, Heffern mengatakan bahwa memang banyak anggota Konggres Amerika yang tertarik dengan masalah kesejahteraan di Papua.

"Banyak anggota kongres di Amerika yang memang tertarik dengan masalah-masalah kesejahteraan di Papua".

27 April

Tuntutan referendum penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua kembali muncul di Papua. Di Jayapura, sekitar 300 pengunjukrasa yang menilai pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua telah gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Unjukrasa itu dilakukan di halaman Kantor Gubernur Papua. Sebagian pengunjukrasa mengenakan pakaian tradisional Papua. Mereka membawa berbagai poster yang menyuarakan aspirasi tuntutan referendum bagi penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Para pengunjukrasa menuntut dilakukannya referendum penentuan nasib sendiri orang Papua untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1 Mei

Front Pepera Papua Barat mengadakan aksi demo bisu di depan Toko Sumber Makmur, Abepura, guna menolak Pepera tahun 1969 dan menuntut referendum. Kelompok ini dipimpin oleh Arkilaus Baho dan melakukan aksi sekitar pk. 11.00-17.00.

Peringatan 44 tahun integrasi Papua ke dalam NKRI diperingati di berbagai tempat di Papua. Di Jayapura peringatan dipusatkan di GOR Cenderawasih dan akhirnya dihadiri oleh Sekda Papua, Andi Baso Basaleng, setelah ditunda agak lama. Dalam kesempatan tersebut dibacakan Pernyataan Sikap 9 butir. Anton Awarawy (68 th) selaku mantan pejuang Pepera mengungkapkan kekecewaannya karena acara tersebut tidak difasilitasi oleh Pemda dan tidak diberikan perhatian serius.

Di Sentani peringatan 44 tahun integrasi diperingati di Kompleks Makam Pahlawan Marthen Indey, Kampung Dosay. Dalam peringatan tersebut dikeluarkan lima butir pernyataan oleh tokoh pembebasan Irian Barat: [1] tetap setia kepada NKRI, [2] siap membantu pemerintah dalam rangka pelaksanaan Otsus di Tanah Papua, [3] menolak dengan tegas setiap upaya untuk merongrong NKRI, [4] siap berkorban jiwa dan raga untuk menjaga NKRI dari Sabang sampai Merauke, [5] Papua merupakan bagian dari NKRI adalah harga mati.

8 Juni

Bertepatan dengan kedatangan Utusan Khusus Sekjen PBB urusan Pembela HAM, Ibu Hina Jilani ke Jayapura, ratusan warga Manokwari yang tergabung dalam Persatuan Nasional Rakyat Papua untuk Pembebasan Papua melaksanakan aksi demo damai di depan kantor DPRD Manokwari. Warga menuntut diadakan referendum bagi rakyat Papua dan meminta PBB mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 November 1969 tentang Pepera.

23 Juni

Masyarakat Papua diminta tidak terpancing oleh isu politik kemerdekaan seputar Organisasi Papua Merdeka (OPM), karena hanya akan membawa malapetaka bagi diri, keluarga maupun tatanan kehidupan masyarakat di daerah paling timur wilayah Indonesia itu. Himbauan itu disampaikan oleh Mantan anggota OPM yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, Drs Filep Karma terkait santernya kembali isu pengibaran bendera Bintang Kejora menjelang peringatan lahirnya OPM 1 Juli. "Dari balik terali besi di Lapas Abepura, saya menerima banyak informasi bahwa di tengah masyarakat Papua saat ini sedang beredar isu yang santer

seputar politik kemerdekaan Papua. Saya minta semua lapisan masyarakat di tanah Papua agar tidak terpancing isu tersebut demi terciptanya Papua sebagai zona damai,"

26 Juni

Menanggapi isu HUT OPM 1 Juli, Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Joenso, menegaskan bahwa setiap warganegara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat tetapi kalau aspirasi itu bertentangan dengan koridor hukum atau NKRI, maka akan berhadapan dengan aturan hukum. "Saya minta komponen manapun yang melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat harus memberitahukan kepada pihak kepolisian".

27 Juni

Kapolda Papua, Brigjen. Pol. Max Donald Aer, menegaskan, "Pengibaran bendera Bintang Kejora merupakan suatu pelanggaran karena selama ini dan hingga detik ini, bintang kejora masih dinyatakan sebagai lambang atau bendera yang diklaim sebagai bendera negara Papua Barat".

28 Juni

Sekjen PDP, Thaha Alhamid, meyakinkan publik supaya tidak perlu khawatir dengan desas-desus pengibaran bendera pada tgl 1 Juli yang dikabarkan sebagai hari ulang tahun pendirian OPM.

Ketua Forum Komunikasi Generasi Muda Pejuang Pembebasan Irian Barat, Nico A.J Maury meminta agar masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan isu naik bendera 1 Juli karena aksi provokasi yang sengaja dihembuskan orang yang tidak bertanggung jawab itu hanya merugikan masyarakat sendiri. "Sebagai anak-anak pejuang kami meminta masyarakat Papua tidak terpancing dengan isu-isu provokatif. Toh masyarakat yang jadi korban jika ada kelompok tertentu yang sengaja menghembuskan isu-isu yang tidak bertanggung jawab".

Kapolda Max Donald Aer menanggapi isu 1 Juli dengan mengatakan, hal itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. "Saya sependapat dengan komentar para tokoh-tokoh Papua, untuk tidak usah terlalu membesarkan masalah ini, karena bisa jadi yang sebetulnya tidak ada masalah, kemudian menjadi ada masalah," ucapnya. Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso saat ditanya wartawan terkait isu 1 Juli, pihaknya juga menyatakan hal itu tidak perlu dikhawatirkan. "Itu hanya isu yang sengaja disebar. Saya sudah tahu orang-orang yang menyebarkan isu tersebut. Sehingga apabila hal itu menjadi kenyataan, maka orang-orang itu yang akan kita tindak".

29 Juni

Penasihat LMA Port Numbay, Ramses Ohee, menyerukan kepada masyarakat Papua untuk tetap beraktivitas dan tidak terpengaruh isu 1 Juli.

F. Dinamika Otsus

2 April

Menanggapi rekomendasi rapat kerja KNPI Provinsi Papua tentang unsur Pemuda dalam MRP, Ketua MRP, Agus Alue Alua, menegaskan bahwa hal itu tidak mudah karena perlu mengubah UU No. 21/2001 untuk mengakomodasi usulan itu.

Bupati Sorong Dr. John Piet Wanane,SH,M.Si mengatakan bahwa pemekaran wilayah itu hal biasa, termasuk rencana pemekaran Papua Barat Daya, dan itu aspirasi masyarakat, sehingga kalau presiden, gubernur, bupati, walikota tidak merespon aspirasi masyarakat itu, maka ditinjau dari aspek etika politik dan etika pemerintahan tidak benar. "Pemimpin di negara-negara demokrasi syaratnya harus sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Dia harus respons terhadap aspirasi masyarakat. Presiden saja sudah menegaskan, kalau pemekaran wilayah itu aspirasi murni masyarakat diterima, asal jangan direkayasa oleh elite politik dan elite birokrasi.

3 April

Setelah mengusulkan penundaan pembentukan enam kabupaten di Papua, kini Gubernur Papua Barnabas Suebu menyerahkan keputusan pembentukan enam kabupaten baru kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan tidak lagi berwenang untuk menyetujui atau menolak rencana pemekaran itu. "Ketika saya periksa ulang, ternyata pembentukan enam kabupaten di pegunungan tengah Papua sudah diproses sejak tahun lalu. Sudah ada persetujuan dari bupati induk, Gubernur Papua yang lama, dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Enam kabupaten usulan itu adalah Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Memberamo Tengah (keempatnya dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya), Kabupaten Puncak (pemekaran Kabupaten Puncak Jaya), dan Kabupaten Dogeyai (pemekaran Kabupaten Nabire).

4 April

Sekitar 15 orang mahasiswa yang menamakan diri Ikatan Perwakilan Mahasiswa Papua dipimpin oleh Yan Mandenas melakukan demo damai ke Gedung Negara dan Kantor MRP guna menuntut agar pengangkatan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemprov Papua harus lebih memprioritaskan orang asli Papua.

5 April

Sekitar 1000 orang mama-mama yang bergabung dalam Forum Komunikasi Perempuan Papua dan Non-Papua melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Merauke guna meminta agar Provinsi Papua Selatan segera dibentuk. Kelompok perempuan ini dilaporkan berasal dari Kabupaten Asmat, Boven Digul, Mappi, dan Merauke. Mereka diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke Jorgen Betaubun dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Alasan yang disampaikan adalah kesulitan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang selama ini menghimpit mereka.

Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Selatan, Waryoto, menyatakan kekecewaan mereka di Jayapura saat tim tidak diterima oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Meski demikian pihaknya tetap melakukan proses ini dan juga melakukan kerjasama dengan Pusat Demokrasi UNCEN untuk membuat kajian akademis sebagai persyaratan mutlak untuk memenuhi perelengkapan administrasi pembentukan provinsi Papua Selatan.

9 April

Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Merauke mendukung rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan. Bentuk dukungan itu disampaikan ratusan warga IKT dengan menuangkan tanda tangan di atas kain putih panjang yang telah disiapkan. Sebelumnya, mereka mendatangi Sekretariat Bersama Pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS), Jalan Ahmad Yami Merauke. Tanda tangan pertama dibubuhkan oleh

Ketua IKT Kabupaten Merauke Tangke Mangi, SE, beserta pengurus dilanjutkan warga IKT lainnya. Ketua Pemuda IKT Kabupaten Merauke Marcel Mangera dan pengurusnya serta pemuda IKT Kabupaten Merauke lain juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan atas pembentukan Provinsi Papua Selatan yang tengah diperjuangkan. "Ini murni kami lakukan sebagai warga Merauke tanpa ada paksaan atau iming-iming dari siapapun. Kami berharap Provinsi Papua Selatan bisa segera terbentuk," kata Ketua IKT Kabupaten Merauke, Tangke Mangi, SE.

11 April

Ketua Komisi B DPRD, Paul Sumino, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemprov Papua untuk mendatangkan investor. Hanya saja pihaknya menegaskan pentingnya perdasus untuk mengatur hal ini agar investasi sungguh menyejahterakan masyarakat.

13 April

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menegaskan bahwa tuntutan pejabat harus orang asli Papua tidak dapat membabi buta. Karena itu pihaknya mengadakan uji kelayakan bagi setiap calon pejabat yang akan dipilih guna mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat.

14 April

Sidang pleno MRP menetapkan empat pokok pikiran untuk raperdasus, yakni raperdasus kewenangan khusus, raperdasus tugas dan wewenang MRP, raperdasus lambang dan simbol daerah, dan raperdasus tentang kesatuan kultur.

16 April

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menggelar pertemuan bersama dalam rangka rekonsiliasi politik setelah selama beberapa tahun terlibat konflik politik pemekaran Provinsi Papua Barat/Irian Barat Jaya sekaligus membahas revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

18 April

Drs. M. Musa'ad menyatakan bahwa pemkab Merauke telah meminta Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan. Untuk pihak rektor uncen telah menunjuk Pusat Kajian Demokrasi untuk melakukannya.

Gubernur Barnabas Suebu dan Gubernur Abraham O. Atururi bersama-sama memimpin raker bupati dan walikota se-Tanah Papua di Biak. "Apapun alasan dan alasan apapun, konflik harus diakhiri. Provinsi Papua dan Papua Barat harus bersama-sama bicara dengan pemerintah pusat untuk berada kembali 100 persen di dalam payung hukum Undang-undang Otonomi Khusus. Kita akan bersama-sama mengusulkan drai pertemuan ini supaya Inpres No. 1 dicabut oleh Presiden dan kembalikan provinsi ini ke dalam payung hukum Otonomi Khusus dengan dasar hukum yang pasti sesuai Undang-Undang Otsus," demikian penegasan Gubernur Papua.

19 April

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menjelaskan bahwa hasil kesepakatan payung hukum Provinsi Papua Barat yang diambil dalam pertemuan informal di Biak akan dibawa ke Pemerintah Pusat. Kesepakatan itu dibuat oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat, Abraham O'Atururi, Ketua DPRD Papua Barat, Jimmi Demianus Ijje, Wakil Ketua I DPRD Komaruddin Watubun, Wakil Ketua II DPRD., Ev.

Joop Kogoya, Wakil Ketua III DPRP, Paskalis Kossy, Ketua MRP, Agus Alua, Wakil Ketua I MRP, Ir. Frans Wospakrik. Kesepakatan tersebut adalah: [1] Provinsi Papua Barat diletakkan dalam kerangka Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otsus, [2] UU Otsus diberlakukan di seluruh Tanah Papua, [3] pembentukan tim dari DPRP, MRP, dan DPRD untuk membahas hal-hal teknis dengan melibatkan pakar hukum paling lambat minggu ketiga Mei 2007 di Jayapura, [4] hasil kerja tim tersebut akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat dan diikuti upaya legislasi bagi Provinsi Papua Barat.

23 April

Nama Provinsi Irian Jaya Barat (Iriabar) secara resmi berubah menjadi Provinsi Papua Barat. Perubahan nama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat.

Tim Kajian *Democratic Center* Universitas Cenderawasih sebanyak 18 orang tiba di Merauke guna memulai kajian selama 6 bulan. Kedatangan tim ini dipimpin oleh M. Musa'ad.

Kepala Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cenderawasih, Musa'ad, memandang bahwa kesepakatan antara Papua dan IJB di Biak baru-baru ini berada dalam kewenangan Pemerintah di Papua untuk melaksanakannya. Namun demikian, jika rumusan-rumusan materi tidak jelas, rinci, rasional, dan realistis maka dikhawatirkan kesepakatan Biak tersebut sulit dilaksanakan. Mengenai keberadaan Papua Barat, pihaknya menyatakan bahwa hal ini tetap akan menjadi beban implementasi otonomi khusus.

24 April

Menurut Jimmy, gagasan gubernur jenderal itu mirip dengan ulah pemerintahan pada masa lalu di mana di bawah gubernur jenderal akan ada sejumlah gubernur. Sistem seperti ini tidak dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, DPRD Papua Barat tidak menyepakati adanya gagasan seperti itu. "Saya tidak menandatangani kesepakatan itu," ujarnya. Selain itu, dalam pertemuan rapat informal di Biak, yang dihadiri Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat, DPR Papua, dan MRP, juga muncul keinginan agar Inpres mengenai percepatan pembentukan IJB dicabut kemudian diatur ulang dalam UU 21 tahun 2001.

25 April

Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyusun dan menyerahkan draft inisiatif itu ke pihak DPRP untuk selanjutnya dibahas sebagaimana semangat Otsus Papua. Hal itu diungkapkan Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) Drs. Agus Alua Alue, M.Th. "MRP memang telah menyusun suatu draft inisiatif tentang lagu Papua, semboyan dan bendera Papua".

27 April

Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Papua datang menyampaikan aspirasi bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah gagal, sehingga minta dilakukannya dialog nasional. Massa yang dipimpin Buktar Tabuni dan Markus Haluk itu tiba di halaman kantor gubernur sekitar pukul 11.25 WIT dan langsung menggelar pamflet dan spanduk. Tulisan pada spanduk itu antara lain berbunyi "Otsus gagal segera buka pintu untuk dialog yang bermartabat bagi orang Papua", "Gubernur Papua jangan gadaikan Tanah Papua kepada China dan Jepang untuk bisnis", "Stop Genocide of the Papuan", "review of Papua 1969 dan

reverendum for West Papua", "Pendudukan Indonesia di Papua tidak sah". Selain itu juga ada pamflet dan spanduk yang bertuliskan "Kemanakan uang Otsus pace/mace (DPRP, MRP dan Gubernur) sehingga rakyat Papua masih miskin dan kelaparan yang berakibat meninggalnya puluhan dan ratusan jiwa orang Papua", "Mendesak gubernur segera mempertanggungjawabkan pada publik tentang tidak seriusnya pelaksanaan UU 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua", "MRP, Gubernur dan DPRD desak pusat segera gelar dialog".

28 April

Sekda Andi Baso Basaleng menyatakan bahwa draft perdasus tentang atribut daerah tidak dipermasalahkan asalkan tidak memprovokasi rakyat dan mencederai keutuhan NKRI.

29 April

Mantan tim asistensi RUU Otonomi Khusus (Otsus) Drs. H.M Musa'ad M.Si memberikan komentarnya mengenai draft atribut-atribut Papua tersebut. Pasalnya, atribut tersebut sudah jelas diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sehingga tak perlu dikhawatirkan apalagi ditakuti. "Saya kira tidak jadi masalah karena dalam UU No 21 Tahun 2001 sudah memberikan peluang tentang adanya identitas atau lambang daerah. Karena itu, saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan,"

Adanya pendapat dari sejumlah kalangan (termasuk yang melakukan demo ke Kantor Gubernur Jumat lalu) yang menilai Otonomi Khusus (Otsus) gagal di Provinsi Papua, dinilai Anggota Pokja Papua (perkumpulan masyarakat Jakarta peduli Papua) Drs Frans Maniagasi, MA sebagai pendapat yang berlebihan. Hanya saja, diakui kalau ada sejumlah hal-hal yang perlu dilihat secara bijak, sehingga pelaksanaan Otsus itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua sendiri. Menurutnya, Otsus bagi Papua tidak gagal, hanya pelaksanaannya yang sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang - Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. "Otsus sebenarnya tidak gagal, yang perlu dilihat pada tahap pelaksanaan. Kalau dilihat dari sisi pelaksanaan mungkin tepat, tapi kalau menyatakan secara menyeluruh Otsus gagal itu tidak benar

30 April

Wakil Ketua DPRP Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa raperdasus tentang atribut daerah dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai perjuangan politis karena semua simbol tersebut berasal dari gerakan kemerdekaan Papua.

Kamar Adat Papua yang dipimpin oleh John Haluk mengadakan demo damai ke kantor DPRP dan kantor Gubernur guna mendesak agar Perdasus tentang Pengusaha Asli Papua disahkan.

1 Mei

Ketua LMA Rapel Wau dan Ketua Dewan Adat kabupaten Mappi, Valen Kabagaimu, menyatakan bahwa pada prinsipnya menolak pemekaran Provinsi Papua Selatan karena SDM yang belum berkembang di tiga kabupaten baru. Karena itu diusulkan agar pemekaran dilaksanakan 10 tahun mendatang setelah SDM mencukupi.

2 Mei

Koalisi Masyarakat Peduli Tanah Papua melakukan pemalangan ruang kerja Sekda di Kantor Gubernur Dok II bawah, Jayapura. Pemalangan dipimpin oleh Markus Haluk

dengan tujuan menagih janji pertemuan dengan Gubernur Papua yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Sekda tetapi belum terpenuhi. Akhirnya mereka diterima oleh Wagub Alex Hesegem. Dalam kesempatan itu ditegaskan lagi bahwa Otsus telah gagal dan perlu segera diadakan dialog nasional antara Papua dan Jakarta.

9 Mei

Dewan Adat Byak menolak rencana pendeklarasian Provinsi Papua Utara mengingat telah ada kesepakatan Mansinam antara Papua dan IJB sehingga diharapkan semua pihak menghargainya. Karena itu rencana pemekaran itu harus melalui proses yang wajar dan dilakukan melalui mekanisme serta prosedur ketatanegaraan yang benar.

11 Mei

Menurut Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2007 tentang pembagian dana Otonomi Khusus tahun 2007 Kabupaten Yahukimo mendapat alokasi dana sebesar Rp. 64.860.080.000,-

Sekda Provinsi Papua, Andi Baso Basaleng, menjelaskan bahwa pihak Pemprov Papua telah memberikan tanggapan terhadap aspirasi pemekaran Papua Selatan melalui Surat Gubernur No. 125 tertanggal 23 Maret 2007 yang menyatakan agar aspirasi tersebut memenuhi persyaratan perundang-undangan.

15 Mei

Ratusan warga di Kota Serui menghadiri upacara pencahangan berdirinya Provinsi Papua Utara Teluk Cenderawasih atau disebut Papua Teluk Cenderawasih (PTC). Upacara dilakukan di Lapangan Trikora, Alun-alun Kota Perjuangan Serui, pukul 10.00 WIT di Serui, Kabupaten Yapen Waropen. Ketua Panitia Pencahangan Provinsi Papua Teluk Cenderawasih, Philips Wona, mengatakan, pencahangan ini merupakan aspirasi masyarakat. Ada keinginan memekarkan wilayah provinsi sebagai sebuah wilayah otonom yang berdiri sendiri dan dapat mengatur warga di Kawasan Teluk Cenderawasih.

Dewan Adat Yapen Waropen menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua Utara seperti dinyatakan oleh ketuanya, Apolos Mora. Karena itu pihaknya meminta Pemerintah Pusat untuk tidak mengakomodasi rencana tersebut.

17 Mei

Auditor Utama Tingkat IV BPK, Baharuddin Aritonang, menegaskan bahwa sebaiknya usulan pemekaran daerah baru dihentikan karena mayoritas daerah baru itu belum memiliki infrastruktur dan masih bergantung pada kabupaten induk. Dijelaskan bahwa ada 164 daerah pemekaran baru dan 148 di antaranya (83%) yang terdiri dari 7 provinsi, 114 kabupaten, 27 kota masih menggantungkan diri pada DAU.

18 Mei

Wakil Ketua I DPRP Komaruddin Watubun mendukung penuh seruan BPK untuk menghentikan pemekaran daerah. Pihaknya mengatakan agar pemekaran yang sudah ada di Papua ini dievaluasi dulu secara total karena meski pemekaran telah menciptakan lapangan pekerjaan tetapi mayoritas rakyat tetap miskin dan terbelakang.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang, menjelaskan bahwa Depdagri menyambut baik usulan BPK dan sedang menyelesaikan evaluasi atas 164 daerah pemekaran tersebut. Berdasarkan hal ini, akan diajukan revisi atas PP No. 129 tahun

2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

20 Mei

Butuh komitmen tinggi dan perlakuan khusus agar Papua bisa maju utamanya dalam hal investasi, mengingat kondisi topografi dan masyarakatnya yang berbeda dengan daerah lainnya. Demikian pokok dialog interaktif bertajuk Potensi ekonomi di Papua antara Wapres Jusuf Kalla dalam dialog-nya dengan Gubernur Barnabas Suebu, SH, Bupati Tolikara John Tabo dan Bupati Paniai Naftali Yogi serta Ketua KADIN Provinsi Papua. Seperti diketahui, dialog ini berlangsung di Bank Papua usai peresmian operasional Metro Papua TV. Dalam dialog yang berlangsung satu jam itu, Gubernur Suebu antara lain mengemukakan sejumlah hambatan investasi di Papua, khususnya menyangkut kewenangan yang mana sesuai amanat UU 21 Tahun 2001, harusnya sudah diberikan kepada Papua kecuali 5 hal (Militer, Fiskal, Hukum, Luar Negeri dan Agama) tetapi sampai saat ini sebagian besar wewenang itu belum juga diberikan khususnya yang terkait dengan investasi. "Implementasi Otsus masih bermasalah, pusat belum konsisten dalam menerapkan Undang Undang 21 tahun 2001 karena kewenangan belum semuanya diberikan ke daerah," kata Suebu. Gubernur juga mengatakan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan suatu temu investasi, ia melihat banyak hal baru yang mendorong investasi di Papua tetapi terkendala oleh wewenang yang masih dipegang pusat. "Kami dari Papua siapkan daya tarik investasi. Salah satunya adalah 'pelayanan satu atap' yang betul-betul disiapkan untuk melayani investor di Papua. Karena itu mohon dukungan dari pusat supaya perizinan mulai dari bupati, gubernur sampai pusat kita bisa siapkan kalau bisa tercepat, termurah untuk para investor," pintanya. Menanggapi hal itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa sebenarnya secara prinsip sesuai undang -undang dasar dan undang - undang di bawahnya penyerahan sebagian wewenang itu ada di dalam Otsus, khususnya menyangkut pengelolaan hak - hak kepada daerah. "Pusat memang hanya menjaga standar dan prosedural agar berjalan sesuai aturan yang ada. Kalau ada yang diatur dari pusat tidak berarti kekuasaan itu diambil alih, Katakanlah ini harus begini, supaya ada suatu system nasional yang berjalan, walaupun pada akhirnya berjalan. Saya juga tentu tidak mengatakan bahwa semua itu sudah sejalan," katanya.

21 Mei

Tim EU Troika mengunjungi Jayapura guna memantau dari dekat pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. Delegasi ini dipimpin oleh Bp. Thomas Streider (atase politik Kedubes Jerman). Tim ini menemui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

23 Mei

Delegasi EU Troika mengunjungi Wamena dan disambut dengan unjuk rasa dari AMPTI yang dipimpin oleh Buktar Tabuni. Tim ini diterima oleh Sekda Chris Wopari dan berkunjung ke sejumlah tempat seperti RSUD Wamena dan SD YPK Bethlehem.

Sekretaris Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen N. Tukiji, mendesak gubernur dan mendagri agar segera melaksanakan pembentukan kabupaten tersebut sesuai dengan UU no. 9/ 2007.

24 Mei

DPRP Papua menanggapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan dengan menurunkan tim pemantau ke Merauke yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Komaruddin

Watubun. Menurutnya Dewan memiliki tugas menampung dan tidak mempunyai kewenangan untuk menolak atau menyetujui aspirasi tersebut.

26 Mei

George Celcius Auparay SH dilantik sebagai Sekda Provinsi Papua Barat oleh Gubernur Abraham O. Atururi berdasarkan Keppres No. 50/M/2007 tertanggal 25 April 2007. Pelantikan ini diprotes oleh ratusan warga setempat karena baik Sekda dan Gubernur adalah orang Serui.

Ketua Panitia Legislasi DPRP, Demas Patty, menjelaskan bahwa DPRP menargetkan untuk menuntaskan 20 Perdasu dan Perdasus, seperti tentang gizi, pendidikan, RSUD, perekonomian, kerakyatan, HIV/AIDS, bahan bakar, dsb.

28 Mei

Gubernur Barnabas Suebu mengungkapkan pemborosan dana Otsus sebesar Rp. 10 triliun selama 5 tahun yang 90% nya dihabiskan untuk honorarium dan uang jalan. Penyelewengan dana ini agak sulit dideteksi karena menurutnya, dana itu tidak diberi kode khusus pada APBD.

29 Mei

Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan, mengatakan bahwa pihaknya memberi tanggapan positif atas usulan didirikannya Provinsi Papua Selatan sebagaimana disampaikan Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Yusak Yaluwo.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mengungkapkan bahwa dari jumlah keseluruhan dana Otsus, 90% lebih dimakan oleh birokrasi dan tidak sampai 10% untuk kepentingan masyarakat. Karena itu hal ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang.

3 Juni

Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI), sebuah kelompok independen pendukung keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 12-24 Mei 2007 berada di Amerika Serikat dan Inggris untuk mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. "IGSSARPRI, sebagai suatu wadah LSM, yang awalnya berbasis di Papua Nugini berada di AS dan Inggris untuk mempromosikan status Otsus dan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang dinilai sebagai solusi politik yang fair bagi rakyat Papua dalam bingkai NKRI," kata Ketua Badan Pelindung dan Penasehat IGSSARPRI, Franzalbert Joku.

4 Juni

FOKER LSM Papua melalui Sekretaris Eksekutif, Septer Manufandu, mendesak Gubernur agar mengambil tindakan terkait dengan pengungkapan 90% pemakaian dana Otsus selama ini hanya untuk kepentingan birokrasi. Pihaknya juga menegaskan bahwa tindakan korupsi tersebut merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

8 Juni

Anggota MRP Ir. N.A. Maidepa, mengatakan kurang maksimalnya peran lembaga tersebut karena hak-hak legislasi dan hak politiknya terkesan dikebiri.

12 Juni

Bupati Biak Yusuf Maryen mendukung aspirasi pemekaran Numfor yang sudah disampaikan kepada Gubernur Barnabas Suebu. Alasannya adalah lokasi tersebut jauh dari pusat kabupaten dan telah memiliki pelabuhan dan lapangan terbang sendiri serta didukung oleh masyarakat.

14 Juni

Ketua DPRD Biak Numfor, Nehemia Wospakrik, menyatakan pihak dewan menilai wilayah tersebut layak dimekarkan menjadi kabupaten dengan melihat kondisi umum dan sarana penunjang yang telah ada. Persoalan yang ada sekarang adalah masyarakat Numfor belum seluruhnya memberikan dukungan.

21 Juni

Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Anis Th. Sabami, menyatakan bahwa MRP telah menyerahkan raperdasus tentang perlindungan perempuan kepada DPRP untuk ditindaklanjuti.

"Kami telah mendeklarasikan Papua sebagai 'Tanah Damai' karena kami tidak lagi memakai senjata atau perlawanan bersenjata. Kami bawa keluar perlawanan bersenjata dari hutan dan memindahkannya ke kota dalam wujud pekerjaan advokasi, diplomasi, dan tindakan tanpa kekerasan" demikian pernyataan Viktor Kaisiepo, anggota UNPO dari Papua. Dia menegaskan bahwa meski UU Otsus sudah diberlakukan sejak 2001, tidak ada kemandirian dan otonomi nyata dan rakyat Papua masih terus menderita diskriminasi dan ketimpangan. "Ini tidak hanya soal meraih kemerdekaan politik tetapi juga penguasaan atas sumber daya alam kami. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan sarana kemajuan infrastruktur dan ekonomi".

23 Juni

Pada *public hearing* antara Anggota DPD-Utusan Papua Provinsi Papua, Pdt Max Demotouw dengan sejumlah pihak yang datang dari berbagai unsur di Gedung Sarinah kemarin sejumlah peserta mengungkapkan beberapa hal aktual yang kini terjadi di Papua. Misalnya saja belum optimalnya implementasi UU 21 tahun 2001 yang indikasinya pada masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, sebagian dari mereka merasa lebih baik 'merdeka' saja dari pada Otsus tidak mampu memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat Papua. "Jika memang kondisinya begini, maka lebih baik 'Merdeka' saja. Papua hanya jadi korban," ungkap Ketua DPRD Kota Jayapura Drs Theopillus Bonay yang ikut menjadi peserta *public hearing* itu.

28 Juni

Ketua Pansus Dana Otsus 2006 DPRD Kabupaten Mimika, Max Samaran, menjelaskan bahwa pansus tersebut dibentuk guna mengkaji penggunaan dana Otsus tahun 2006 bagi Kabupaten Mimika senilai Rp. 29 milyar yang belum jelas pertanggungjawabannya.

29 Juni

Bupati Merauke, John Gluba Gebze, menargetkan bahwa pembentukan provinsi Papua Selatan selesai pada tahun 2008 karena persiapan-persiapan sudah ditempuh termasuk lobi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pihaknya tinggal menunggu kajian akademis yang sedang disiapkan oleh Universitas Cenderawasih.

Ketua Pokja Agama MRP, Pdt. Benny Yantewo, menyatakan harapannya agar dengan kunjungan anggota Konggres Amerika ke Papua berdampak pada implementasi Otsus,

yakni pengawasan Otsus mendapat pengawasan dari Amerika dan Uni Eropa seperti yang terjadi di Aceh.

II. Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

A. Hak atas Pendidikan

12 April

Sekitar 70-an orang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen, Jayapura, melakukan demo menuntut Dekan FKM, Drs. AL. Rantetampang, M.Kes mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memajukan FKM. Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa sejak dibuka th. 2000 FKM sering mengadakan pungutan liar yang memberatkan mahasiswa.

15 April

Menanggapi demo 70-an mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Rektor Uncen, Bert Kambuaya, dengan menjelaskan bahwa desakan itu terlalu berlebihan. Dugaan penyelewengan tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jakarta. Yang ada adalah kelemahan-kelemahan administrasi yang dapat dibenahi.

16 April

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Dra. W.W. Kambuaya, mengatakan bahwa pihaknya sudah siap 100%. "Segala persiapan kita finalkan dan tidak ada persoalan yang berarti". Ada 23 SMA dan 9 SMK yang akan melaksanakan UAN dan sebanyak 3270 siswa-siswi.

20 April

Pemilik tanah lokasi SDN Vim III Kotaraja, Marthen Erick Srem-Srem, menyatakan bahwa pihaknya melakukan pemalangan karena Pemkot Jayapura dianggap mengingkari janji untuk melunasi pembayaran tanah lokasi SD tersebut. Pihaknya menjelaskan bahwa pada th. 1989 lokasi SD dibangun di atas tanah seluas 4200 m tetapi pada tahun 2000 saat dilakukan pengukuran ulang oleh BPN, ternyata areal yang dipakai seluas 7.373 m. Karena itu mereka sekarang menuntut hak-haknya dari selisih luas lahan tersebut. Tindakan ini disesalkan a.l. oleh Ketua Kerukunan Keluarga Jayawijaya, Philipus Halitopo.

24 April

Walikota Jayapura, MR. Kambu, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak pemilik tanah adat SDN Vim 5 Kotaraja guna mengakhiri pemalangan.

26 April

Pelaksanaan ujian nasional SDN 4 Maripi, Manokwari, terpaksa dilakukan di lokasi PAUD Ursula Anday milik Gereja Katolik akibat pemalangan yang dilakukan oleh pemilik tanah. Guru-guru telah meminta Pemkab Manokwari untuk turun tangan.

2 Mei

Pada peringatan Hardiknas di Sasana Krida, Jayapura, Kepala Dinas P dan P, James Modouw, mengungkapkan bahwa mulai 23 Mei 2007 diterapkan sistem kesejahteraan guru bagi guru-guru di pedalaman. Ketetapan ini diputuskan dalam SK Gubernur.

Pemkot Jayapura memberikan penghargaan kepada 28 orang guru di lingkungan Kota Jayapura. Guru-guru tersebut mencakup SD, SMP, SMA, SMK, dan juga pengawas sekolah.

3 Mei

Wagub Alex Hesegem menjelaskan bahwa Pemprov Papua tidak akan melupakan guru yang ada di wilayah perkotaan dan tetap memberikan tunjangan juga. Namun demikian, prioritas diberikan kepada guru-guru di wilayah pedalaman. Sistem ini akan diberlakukan mulai tgl. 23 Mei 2007.

Kepala Dinas P dan P, James Modouw, menjelaskan bahwa guru dan pengawas yang akan mendapat tunjangan pedalaman sebanyak 5.348 orang yang terdiri dari 5.148 orang guru dan 200 pengawas. Tunjangan kemahalan sebesar Rp. 2,5 juta/ bulan/ orang, tunjangan pendidikan anak guru sebesar Rp. 500.000/ bulan untuk dua anak, tunjangan kesehatan Rp. 250.000/ bulan/ orang, tunjangan liburan 6 bulan sekali di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Puluhan siswa dan guru SMP 7 Sentani mendatangi kantor Dinas P dan P Kabupaten Jayapura di Gunung Merah guna menanyakan status sekolah mereka karena proses belajar mengajar sering diganggu orang mabuk dan rumah guru dilempari batu.

Di Merauke, Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, mengungkapkan 300 anak dari 26 SD tidak mengikuti ujian karena proses belajar mengajar lumpuh. Mereka berasal dari daerah Kimaam, Okaba, dan sejumlah daerah lainnya.

4 Mei

Kepala Universitas Terbuka Uncen, Dr. Leonard Sagisolo, menegaskan dukungannya terhadap rencana Pemrov Papua untuk memberikan tunjangan bagi guru di pedalaman. Dia mengharapkan bahwa hal itu bukan sekedar wacana dan dibuat pedoman yang jelas agar pelaksanaannya terukur.

15 Mei

Sekitar 150-200 guru TK hingga SMA/ SMK di Kabupaten Biak melakukan aksi mogok mengajar dan mengancam tidak akan melakukan ujian akhir sekolah jika realisasi tunjangan tenaga kependidikan sesuai Perpres No. 58/2006 dan uang lauk pauk sesuai Permenkeu No. 22/PMK/05 Tahun 2005 tidak dipehuhi. Mereka melakukan aksi demo ke DPRD Biak Numfor dan diterima oleh Ketua DPRD, Nehemia Wospakrik.

19 Mei

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Dra. W.W. Kambuaya mengatakan bahwa sebanyak 900 orang pelajar Paket A, B, C, sudah siap mengikuti Ujian Nasional.

21 Mei

Sekitar 80 orang mahasiswa USTJ jurusan tambang melakukan aksi unjuk rasa di kampus guna menuntut agar kinerja dosen dan manajemen kampus diperbaiki karena dinilai pilih kasih, lamban, dan tidak disiplin.

25 Mei

Dana BOS untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 3,4 milyar siap disalurkan. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Dr. Jack Ayamiseba. Penyaluran itu mencakup TK-SMA dan akan didahului oleh sosialisasi menyangkut penyaluran dan penggunaan dana BOS ini.

30 Mei

Di Wamena, ratusan guru menggelar aksi demo di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya karena tunjangan insentif dan dana BOS triwulan IV tahun 2006 belum dibayarkan.

31 Mei

Kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan guru SD masih dibutuhkan 3200 orang guru.

11 Juni

Ratusan guru SD, SMP, SMA di Wamena melakukan demo ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya guna menuntut pembayaran insentif triwulan I. Kepala Dinas P dan K, Daniel Tabuni, mengatakan pihaknya berjanji membayarkan insentif tersebut di sekolah masing-masing dan bukan di kantor dinas. Pendemo tidak puas dan melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Jayawijaya.

13 Juni

Direktur Reserse dan Kriminal, Kombes Pol. Paulus Waterpauw, mengungkapkan bahwa pihak Polda akan melakukan gelar perkara berkaitan dengan korupsi dana BOS sebesar Rp. 24 milyar yang kini masih ditangani. Perkara ini juga terkait dengan 34 ribu eksemplar buku yang masih tersimpan di gudang Kantor Pos Jayapura yang ternyata bukan pesanan Dinas P dan P Provinsi Papua.

16 Juni

Kasubdin Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas P dan K Kabupaten Jayawijaya, Amsal Wamu, menjelaskan bahwa tingkat kelulusan SMA dan SMK di Jayawijaya mencapai 90,36%. Sementara itu di Kota Jayapura, tingkat kelulusan mencapai 82,88 seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas P dan K Kota Jayapura, Ibu W.W. Kambuaya. Di tingkat Provinsi Papua, tingkat kelulusan mencapai 84,6%.

27 Juni

Meski alokasi dana BOS tahun lalu bermasalah dan belum tuntas, Ketua Satuan Kerja Penyaluran Dana BOS Provinsi Papua, Drs. Paulus Y. Indubri, menjelaskan bahwa tahun 2007 alokasi dana BOS akan tetap dicairkan dan mencapai jumlah Rp. 130.293.105.000. Ini berarti lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 102.039.050.375.

B. Hak atas Kesehatan

12 April

Puluhan pendeta yang tergabung dalam Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua, mendatangi gedung para wakil rakyat Papua (DPRP). Meski mengusung sejumlah aspirasi umat, namun kedatangan para pendeta ini bukan demo, melainkan menyampaikan aspirasinya dalam bentuk beraudensi dengan para wakil rakyat. Salah satu aspirasi yang sangat mendesak disampaikan para pendeta ini adalah 'perang' dengan Minuman Keras (Miras).

15 April

Kasubdin Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan Dinkes Biak Numfor dr. Syukri M.Kes menjelaskan bahwa 77 kampung di Kabupaten Biak yang tersebar di 10 distrik tidak memiliki tenaga bidan. Dari 130 lebih tenaga bidan, hanya 40% yang tinggal di kampung-kampung karena tidak adanya perumahan, fasilitas kerja seperti Polindes atau Pos Persalinan Desa.

Kepala Dinas Kesehatan Merauke, drg. Josef Rinta M.Kes mengungkapkan bahwa Dinkes sudah berhutang ke RS Cikini Jakarta sebesar Rp. 1,5 milyar karena proses rujukan selama ini tidak diatur secara baik.

19 April

Kepala Subdin Pemberantasan Penyakit Menular Kabupaten Mimika, Saiful Taqim, menjelaskan bahwa angka penderita HIV dan AIDS di Mimika meningkat dari 1.210 pada Desember 2006 menjadi 1.300 kasus pada Maret 2007. Jumlah kasus tersebut terdiri dari 285 kasus ibu rumah tangga, 225 kasus petani, 182 kasus PSK.

4 Mei

dr. Tigor Silaban, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan pemberian tunjangan tambahan bagi petugas kesehatan di pedalaman. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada.

6 Mei

Pramuka, Mudika Paroki Gembala Baik, dan Pemuda Muhammadiyah melakukan aksi teatrikal di lingkungan Abepura untuk mengajak publik Jayapura untuk menangani dan melindungi ODHA.

8 Mei

Belasan tenaga medis dari Puskesmas Tanjung Ria, Distrik Jayapura Selatan, melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Jayapura karena kondisi bangunan sudah tidak memenuhi syarat. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay, Wakil Ketua II, Julius Mambay, dan Ketua Komisi D, Ichwanul Muslimin.

10 Mei

Dari kunjungan Pdt. Gideon Byamugisha dari Uganda yang membagikan pengalaman pribadi dalam memerangi HIV dan AIDS, para pemimpin agama di Papua yang tergabung dalam FKPPA bertekad memerangi masalah HIV dan AIDS yang ada di Papua dalam upaya membangun Papua sebagai Tanah Damai.

12 Mei

dr. Tigor Silaban, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, menjelaskan bahwa Pemprov Papua mengalokasikan dana sebesar Rp. 20 milyar untuk pengadaan obat dan seluruhnya bersumber pada dana otsus 2007. Obat-obat tersebut bersifat gratis dan mencakup berbagai macam penyakit. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah distribusi ke daerah yang bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten.

14 Mei

Pdt. Gideon Byamugisha dari Uganda menjelaskan bahwa semua orang berpotensi terinfeksi virus HIV. Dia juga mengungkapkan bahwa melalui penanganan serius jumlah pengidap HIV/ AIDS di Uganda turun dari 15% menjadi 6%.

20 Mei

Malam Renungan HIV/AIDS Nusantara (MRAN) Tingkat Kota Jayapura dilakukan The Plaza PTC Entrop. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KPAD Kota Jayapura, Drs MR Kambu, M.Si mengatakan, laju pertumbuhan virus HIV/AIDS di Papua, khususnya di kota Jayapura sudah pada angka yang mencemaskan kita semua. Sebagaimana diketahui bahwa kasus HIV/AIDS di Papua yang kini sudah menembus angka 3252 kasus/penderita, dimana 253 diantaranya di Kota Jayapura. Bila angka-angka itu dikelompokkan menurut usia, maka yang paling banyak terinfeksi adalah kelompok produktif (usia 19-39 tahun). "Untuk itu, virus ini adalah masalah bersama," jelasnya.

22 Mei

Tenaga Medis di ruang VCT RSUD Manokwari melakukan aksi mogok kerja karena karena sarung tangan untuk kerja habis.

1 Juni

Menkes Fadilah Supari mengaku amat kecewa dengan ketidakhadiran para bupati/ walikota pada acara diseminasi STHP Papua di Sasana Krida. Ia menegaskan, "Bagaimana mungkin melakukan rencana yang disebut sebagai *save Papua* untuk penanggulangan HIV/ AIDS berjalan baik jika bupatinya saja kurang *komit* dengan hal tersebut".

2 Juni

Dari pengobatan massal tim PKK Kota Jayapura di Kelurahan Abepantai, Jayapura, ditemukan penyakit terbesar adalah ISPA 85 kasus, penyakit kulit 54 kasus, rematik 26 kasus, malaria 23 kasus, maag 12 kasus.

12 Juni

Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Julius Mambay, menyatakan bahwa pelayanan RSUD Dok II dan RSUD Abepura harus diperbaiki termasuk juga manajemennya karena pelayanan amat lambat. Hal ini amat berbeda dibandingkan dengan RS Bhayangkara, TNI AL dan rumah sakit non pemerintah lainnya. Karena itu pihaknya mendesak agar Pemkot mencabut Perda No. 6 tahun 2006.

13 Juni

Direktur RSUD Abepura, dr. A.K. Mallisa, membantah pandangan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Julius Mambay, yang menyoroti kelemahan pelayanan dan pungutan di RSUD Abepura. Pihaknya menegaskan bahwa seluruh jajarannya telah bertindak sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Papua

sehingga pelayanan didahulukan dan pungutan biaya disesuaikan dengan kondisi pasien berdasarkan ketentuan perda tersebut.

15 Juni

Wakil Walikota Jayapura, Sudjarwo, menyatakan bahwa kalangan remaja sangat rentan terhadap penularan IMS dan HIV/AIDS. Itu disebabkan karena pergaulan yang bebas dan pemahaman yang rendah mengenai penyakit-penyakit tersebut.

18 Juni

Dokter hewan dari Dinas Peternakan Provinsi Papua, drh. M. Nadeak, menyatakan bahwa uji cepat atas kotoran 2 ayam di Kotaraja ditemukan penyakit flu burung. Inilah yang diduga kuat sebagai penyebab kematian 30 ekor ayam di Cigombong, Kotaraja.

23 Juni

Direktur Yayasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Provinsi Papua, Drs TG Butar-Butar, M.Kes mengatakan pola penyebaran virus HIV/AIDS sudah sampai ke tingkat kampung sebab sesuai hasil intervensi, advokasi, penyuluhan atau penanganan yang dilakukan pihaknya sampai di tingkat kampung-kampung seperti di Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan wilayah Pegunungan, cukup banyak masyarakat kampung yang mulai terinfeksi virus tersebut. Hal itu disebabkan dari penyebaran penduduk baik migrasi maupun urbanisasi yang bila dilihat dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama perpindahan penduduk dari kota ke kampung dan sebaliknya. Hal lainnya adalah diakibatkan oleh perilaku kehidupan modern yang sedikit abnormal (menyimpang). Juga penyebaran virus itu mengikuti pertumbuhan pembangunan, terutama di daerah industri dan perusahaan yang mana membutuhkan tenaga kerja cukup banyak, yang notabenehnya diambil dari luar Papua.

29 Juni

Wakil Walikota Jayapura, Soejarwo, menyatakan bahwa virus HIV dan AIDS sungguh-sungguh telah menjadi bahaya yang mengancam kota Jayapura karena dalam satu minggu terakhir, 7 orang ODHA meninggal dunia. Dengan demikian jumlah ODHA yang meninggal di Provinsi Papua meningkat menjadi 46 orang dari jumlah sebelumnya 39 orang.

C. Kesejahteraan Umum

1-2 April

Banjir melanda Kampung Helesomeak, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, dan mengakibatkan longsor dan kerusakan kebun seluas 5 Ha.

3 April

Banjir kembali melanda wilayah Arso, dan PIR I, Kabupaten Keerom, hingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Banjir disebabkan oleh luapan Kali Tami dan merusak jembatan Tami, perkantoran seperti Polres Persiapan, Kantor P dan K, Kantor Koramil, rumah kediaman bupati, camat, dan sekda. Lebih dari 3000 orang mengungsi.

7 April

Forum Peduli Lingkungan Hidup Cyclops, Sentani, mencanangkan penanaman 1 juta pohon di lingkungan cagar alam Cyclops. Pencanaan ini ditandai dengan penanaman pohon oleh Wakil Bupati Jayapura, Zadrakh Wamebu, di Kampung Sereh, Sentani.

12-14 April

Terjadi kelangkaan BBM di Kota Jayapura dan sekitarnya yang berakibat pada antrian panjang di berbagai SPBU. Menurut pihak Pertamina, hal ini terjadi karena tanker pemasok BBM terlambat datang karena gangguan teknis.

16 April

Masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin (premium) di Kota Jayapura selama tiga hari lalu (Jumat-Minggu), akibat keterlambatan kapal (masalah operasional distribusi), mendapat perhatian serius dari Komisi B (membidangi Perekonomian) DPRD. Menurut Ketua Komisi B, Paulus Sumino, untuk menghindari agar kejadian serupa (kelangkaan BBM) tidak terulang kembali, maka DPRD dengan fungsi pengawasannya akan memanggil pihak PT Pertamina (Persero) UPMS VIII Jayapura sebagai pihak yang bertanggungjawab soal BBM, untuk didengar penjelasannya.

Bupati Yahukimo, Ones Pahabol, menjelaskan bahwa Pemkab Yahukimo akan memasang listrik tenaga surya di 10 titik, yakni Kurima, Ninia, Anggruk, Nalca, Silimo, Nipsan, Sela, Langda, Surusuru, dan Seredala.

17 April

Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire, Ir. Adnan Sembiring, menjelaskan bahwa Pemkab Nabire akan memprioritaskan 5 bidang pada tahun anggaran 2008, yakni peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan tingkat kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

20 April

Sesudah dengar pendapat antara Komisi B DPRD dan PT. Pertamina UMPS VIII Papua, Ketua Komisi B DPRD, Drs. Paulus Sumino, menyatakan bahwa kelangkaan BBM tidak akan terulang lagi.

23 April

Kepala Dinas Depnaker Kota Jayapura, Sabar Simbolon SE, menjelaskan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kota Jayapura mencapai 15.544 orang dari 218.028 orang angkatan kerja di Jayapura. Terbanyak adalah tingkat pendidikan SMA sebesar 60%, SMP 30%, dan SD 10%.

27 April

Dirjend P4T (Pembinaan, Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dyah Paramawartingsih mengatakan, "Jadi untuk transmigrasi ke Papua saat ini belum bisa dilakukan, sebab di Papua ini kan ada UU 21, dimana salah satu pasalnya mengatakan bahwa transmigrasi nasional (transmigrasi mendatangkan warga dari luar Papua) diatur dengan Perdasu ini. Dan Perdasu ini yang kami tunggu - tunggu," ungkapnya. Dikatakan, sejak tahun 1964 sebenarnya pembangunan transmigrasi di Papua sudah sangat besar, dari tahun 1964 sampai dengan terakhir 1999 sudah ada sekitar 78.000 KK yang ditempatkan di Papua.

Namun setelah adanya reformasi dan ditambah lahirnya Undang Undang Otsus tahun 2001, maka sejak tahun 1999 sampai sekarang transmigrasi ke Papua stagnan.

6 Mei

Meski operasi pasar untuk menurunkan harga minyak goreng sudah dilancarkan di sejumlah kota besar di Indonesia, di Kota Sorong, Papua harga minyak goreng masih melambung. Kenaikan harga berkisar antara Rp 3.500 hingga Rp 4.000 per liter. Ini terjadi karena pasokan dari Pulau Jawa dan Sulawesi terus berkurang.

9 Mei

Ketua Ikatan Pengusaha Lokal Kayu Pribumi (IPLKP), Jambres Simanjuntak, menyatakan bahwa 46 perusahaan yang tergabung di dalamnya akan melakukan aksi mogok karena sejak 2003 lalu, izin pengambilan kayu belum dikeluarkan oleh Pemprov Papua tetapi pengusaha ekspor justru mendapatkan izin.

10 Mei

Wakil Ketua I DPRD Papua, Komaruddin Watubun, menanggapi persoalan pemadaman listrik dan akan memanggil PLN untuk memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut.

11 Mei

Menanggapi sorotan terhadap masalah pemadaman listrik di Jayapura yang makin buruk, Manajer PLN Cabang Jayapura, Drs. Erikson Sidabutar menyatakan bahwa pihaknya bersepakat dengan Komisi C DPRD untuk mengatasi kekurangan daya 10 Mega dengan membentuk tim PLN dan Dinas Pertambangan. Tim ini bertugas untuk mengusulkan konsep berapa investasi dan biaya operasi untuk mengatasi kekurangan daya.

14 Mei

Dalam pertemuan dengar pendapat dengan PLN Cabang Jayapura, Ketua Komisi F DPRD, Weinand Watori, menyatakan sangat kecewa dengan sikap PLN yang mengatakan bahwa alat sudah rusak sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pihaknya juga memandang adanya sikap tidak transparan PLN karena ada berbagai macam masalah dan tidak mampu diantisipasi oleh PLN.

15 Mei

Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Elia Karuri SE, meminta agar instansi yang mengeluarkan SIUP dan SITU harus selektif sehingga tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu dikemudian hari.

16 Mei

Pasar Youtefa yang diklaim oleh Pemkot Jayapura sebagai yang terbesar di Asia, kembali terbakar pada pk. 01.30 dini hari dan menghancurkan 288 los dengan kerugian ditaksir sekurang-kurangnya Rp. 2 milyar.

17 Mei

Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay, mengecam kelambanan Dinas Trantip dan Pasar Kota Jayapura dalam mengatasi kebakaran pasar Youtefa.

24 Mei

Ratusan warga masyarakat Jayapura berdemo di Kantor PLN Papua, Jl. Ahmad Yani, menuntut penanganan pemadaman listrik yang makin parah di Jayapura. Dirut PLN tidak bersedia menemui massa.

25 Mei

Ketua Komisi F DPRP, Weinand Watori, mendesak PLN agar memiliki alternatif pemecahan bagi masalah pemadaman listrik yang makin parah di Jayapura. PLN harus mengantisipasi kebutuhan listrik seiring dengan perkembangan daerah.

28 Mei

Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, Terry Levin, mengatakan penertiban PKL dan bangunan liar terhalang oleh karena belum adanya perda yang mengatur hal itu. Tetapi pihaknya tetap melakukan pendekatan persuasif agar para pedagang bersedia membongkar kiosnya dan sekaligus mengajukan rancangan perda ke sidang non APBD 2007.

30 Mei

Satuan gabungan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polri menggusur mama-mama pedagang tradisional dari Jln. Yos Sudarso Wamena. Ketegangan terjadi karena dagangan rusak sehingga mereka menuntut ganti rugi kepada Kepala Distrik Wamena.

4 Juni

Tim gabungan Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura melakukan penggusuran di Jalan Raya Abepura-Kotaraja terhadap PKL yang tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

Di Wamena, sekitar 30 orang mama-mama penjual pinang mengadakan aksi demo damai ke Kantor Bupati Jayawijaya akibat penggusuran yang mereka derita. Mereka menuntut agar mereka diberi tempat berjualan yang layak oleh Bupati.

5 Juni

Di Wamena, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, Polsek, dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar operasi penertiban di sejumlah tempat perbelanjaan di Jl. Irian, Jl. Tawes, Pasar Wouma, dan Pasar Sinakma. Menurut Kepala Distrik Wamena, Lince Kogoya, tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi kota Wamena yang rapi dan bersih.

6-7 Juni

Dinas Trantib Kota Jayapura melanjutkan penggusuran PKL ilegal di Kawasan Entrop. Alasan penggusuran adalah wilayah tersebut akan dibuat drainase sehingga perlu dibersihkan dari bangunan liar. Sejumlah PKL protes atas pembongkaran ini karena tidak disediakan tempat alternatif oleh pemerintah.

8 Juni

Dinas Trantib Kota Jayapura melanjutkan penggusuran PKL ilegal di Ruko Dok II. Alasan penggusuran adalah wilayah tersebut merupakan jalan utama masyarakat dan telah ada surat edaran tertanggal 1 Juni 2007 kepada pemilik kios, pondok tanpa izin untuk segera membongkar.

9 Juni

Selama Turkam di Numfor Barat, Gubernur Barnabas Suebu menemukan kondisi masyarakat yang memprihatinkan di mana guru-guru tidak mengajar, perumahan penduduk hanya beratap daun sagu yang sudah mulai lapuk, dan penghasilan masyarakat hanya Rp. 400.000 per kepala/ bulan.

11 Juni

Koalisi LSM Jayapura (ALDP, LBH Papua, Kontras Papua, dan FOKER) mendirikan pos pengaduan masyarakat yang menderita kerugian akibat pemadaman listrik. Paskalis Letsoin dari LBH menyatakan pihaknya akan melayangkan gugatan terhadap PLN ke pengadilan.

Ketua Komisi F DPRP, Weinand Watori, menagih janji PLN yang akan mendatangkan mesin baru pada bulan Juni ini.

13 Juni

Dinas Trantib Kota Jayapura melanjutkan pengusuran PKL ilegal di Kawasan Terminal Lama dan Abepura. Alasan pengusuran adalah wilayah tersebut akan dibuat drainase sehingga perlu dibersihkan dari bangunan liar. Sejumlah PKL protes atas pembongkaran ini karena tidak disediakan tempat alternatif oleh pemerintah.

14 Juni

Ketua Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan pihaknya mengaku prihatin atas tindakan pengusuran walikota yang dinilai tidak manusiawi. Karena itu pihaknya akan menyurati pihak Walikota karena tidak memberikan alternatif bagi para PKL tersebut.

18 Juni

Empat LSM di Jayapura, yakni FOKER LSM, Kontras Papua, LBH Papua, dan ALDP, menggelar aksi demo damai di depan Saga, Abepura, guna memprotes pemadaman listrik yang makin parah di Jayapura.

20 Juni

Solidaritas untuk Mama-mama Pedagang Asli Papua mengadakan aksi demo damai di Kantor DPRD Kota Jayapura dipimpin oleh para pemimping gereja, LSM, dan mahasiswa guna menuntut agar pengusuran terhadap mama-mama asli Papua dihentikan. Kelompok ini terdiri dari para pemimpin Gereja, LSM, dan mahasiswa. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay.

Sesudahnya tim yang sama melanjutkan aksinya ke kantor MRP di Kotaraja dan diterima oleh Wakil Ketua II, Hana Hikoyabi, dan anggota MRP, Pdt. Hofni Simbiak. MRP berjanji akan menggelar pleno khusus untuk membahas hal ini dengan menghadirkan walikota.

21 Juni

Walikota Jayapura, M.R. Kambu, menanggapi demo Solidaritas untuk Mama-mama Pedagang Asli Papua dengan mengatakan bahwa penertiban tersebut sesuai dengan Perda 14/ 2005 yang ada dan dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang dipakai PKL, yakni trotoar. Sementara itu Sekretaris Komisi C DPRD Kota Jayapura, Achmad Jaenuri, menyatakan bahwa penertiban itu hendaknya disertai solusi yang memadai.

25 Juni

Kepala Dinas Sosial, M. Pogolamun, menyatakan bahwa meski pihaknya telah menyalurkan dana pejuang tahap ketiga tetapi sekitar 2000 lebih pejuang belum mendapatkan haknya. Pada tahap ketiga itu dana sebesar Rp. 5 milyar dibagikan kepada 1111 pejuang dan masing-masing mendapat sekitar Rp. 4,5 juta khusus di Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kabupaten Keerom. Pembayaran di Kabupaten Jayawijaya masih tersendat karena banyak yang belum melengkapi syarat administrasi.

28 Juni

Solidaritas untuk Mama-mama Pedagang Asli Papua kembali mengadakan aksi demo damai di Kantor DPR Papua. Kelompok ini terdiri dari para pemimpin Gereja, LSM, dan mahasiswa. Mereka diterima oleh Wakil Ketua I Komaruddin Watubun, Ketua Komisi C, Yan Ayomi, dan Komisi B. Pihak DPRP berjanji akan memanggil walikota Jayapura guna dimintai keterangannya dalam hal ini.

D. Pengelolaan Sumber Daya alam

1 April

Jajaran TNI AL berhasil menangkap 2 kapal penangkap ikan yang masuk secara ilegal, yakni kapal Fu Yuan Yu-530 dan KM Nusantara. Keduanya tidak memiliki dokumen yang sah.

3 April

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Papua, Ir Marthen Kayoi MM, di Biak, mengatakan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah provinsi dalam bidang kehutanan berupa pemberhentian pemasaran kayu log antarpulau di Indonesia. Ia mengatakan alasan pelarangan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa penjualan kayu log keluar Papua selama ini belum memberikan nilai tambah kepada daerah. "Jika ingin mendapatkan nilai tambah dari kayu log maka harus dibangun industri, jika tidak dilakukan pembangunan industrinya maka tak ada hasil buat daerah bersangkutan," kata Kayoi. Kebijakan pelarangan penjualan kayu log, menurut Kadishut Papua, merupakan komitmen Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam menyikapi pembangunan bidang kehutanan yang nanti akan segera ditindaklanjuti kepada kabupaten/kota secara kongkrit. Kadishut menjelaskan bahwa untuk Provinsi Papua, pihak dinas kehutanan telah menetapkan empat zona wilayah sebagai lokasi industri kayu, yaitu Jayapura, Mimika, Merauke dan kawasan Teluk Cenderawasih yang terdiri atas Biak, Nabire dan Yapen Waropen.

11 April

Ir. Asitiler mengatakan, pihaknya telah memperjuangkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jakarta dalam tahun anggaran 2007 melalui APBN mengalokasikan dana sebesar Rp5,3 milyar untuk budidaya rumput laut dan pengembangan keramba ikan jenis Nila. Dana sebesar Rp5,3 milyar bantuan APBN DKP itu dengan rincian pengembangan rumput laut di Nabire sebesar Rp1,5 milyar, budidaya rumput laut laut dan ikan Nila di Kota Jayapura sebesar Rp1,3 milyar. Pengembangan budidaya ikan nila di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura sebesar Rp300 juta, budidaya rumput laut di Kabupaten Biak Numfor Rp350 juta dan Kabupaten Supiori dengan budidaya rumput laut sebesar Rp1,3milyar. Selain itu, budidaya rumput laut di Kampung Angkaisera,

Pulau Meosnum, Pulau Mesopundi, Pulau-Pulau Ambai dan Kampung Kabuena di Kabupaten Yapen memperoleh dana pengembangan sebesar Rp. 500 juta.

13 April

Ketua LMA Ugimba Paniai, Musa Tipagau, menegaskan tuntutan masyarakat Ugimba, Distrik Bilogai, Kabupaten Paniai, agar dilibatkan dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia karena wilayah Grassberg adalah wilayah hak ulayat mereka.

18 April

Untuk pertama kalinya, PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, didemo 6000-an karyawannya yang tergabung dalam Tongoi Papua (TP) melalui DPRD Mimika. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan yang disampaikan dalam bentuk tujuh tuntutan: [1] penggantian manajemen PTFI, [2] menjawab hasil Mubes Tongoi 15 Februari 2007 di Tembagapura, [3] peningkatan kesejahteraan karyawan tanpa melalui perundingan organisasi apapun, [4] penghapusan beberapa perusahaan privat dan mengembalikan ke satu manajemen PTFI, [5] dukungan dan perlindungan resmi dari MRP, DPRP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika, [6] penetapan mutlak dari MRP dan DPRP agar kantor PTFI ada di Papua sesuai Otsus, [7] unjuk rasa akan dilanjutkan di Grassberg dan Portsite jika tidak ditanggapi.

19 April

Pertemuan antara "Tongoi Papua" yang dipimpin oleh Frans Pigome. dan pihak manajemen PT Freeport yang langsung dipimpin presiden direktornya, Armando Mahler, dan dihadiri anggota DPRD Mimika selaku fasilitator Stef Rahangiar (ketua sementara) dan Yosep Yopi Kilangin (ketua terpilih) belum menghasilkan kata sepakat. Pertemuan tertutup yang dilangsungkan di kantor milik PT.Freeport di Kuala Kencana sejak pukul 11.00 hingga 23.00 WIT membahas tiga tuntutan: [1] kenaikan gaji karyawan, [2] pembentukan, [3]departemen khusus Papua dan [3] pembenahan manajemen perusahaan. Namun pada akhirnya dialog itu mengalami jalan buntu.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menjelaskan bahwa pihaknya telah berbicara dengan PTFI melalui telpon dan menyarankan agar PTFI membuka diri akan tuntutan karyawan. Juga kepada semua pihak yang terlibat dalam demo agar melaksanakan dengan cara yang tertib dan damai.

Di Nusa Dua, Bali, tiga gubernur: Irwandi Yusuf dari Aceh, Abraham O. Atururi dari Papua Barat dan Barnabas Suebu dari Papua, mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kebijakan ramah lingkungan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon dioksida dari proses pembukaan lahan hutan.

20 April

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Daerah Pemilihan III Mimika, Alphius Murib, tiba di Kuala Kencana. Kepada wartawan, Alphius mengatakan bahwa kehadirannya atas rasa prihatin terhadap aksi mogok kerja karyawan karena persoalan intern dengan manajemen Freeport. "Karena orang Freeport buat sendiri, sehingga orang Freeport juga harus diselesaikan," kata Alphius kepada Radar Timika di Kuala Kencana. Ia berharap manajemen FI segera memberi jawaban agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Ia menghimbau perusahaan tidak memberikan sanksi atau mem-PHK karyawan yang melakukan demo.

Frans Pigome, Ketua Tongoi Papua, menyatakan bahwa perundingan menghasilkan tiga tuntutan utama: [1] kenaikan gaji bagi grade F1 dari Rp. 1.6 menjadi Rp. 3.6, [2] pembentukan Departemen Papua Affairs, [3] penonaktifan sejumlah pejabat di lingkungan PTFI.

21 April

Kesepakatan ditandatangani Presiden Direktur (Presdir) dan EVP PTFI Amando Mahler, Ketua Umum BP Tongoi Papua Frans Pigome, dan saksi, yaitu; Penjabat Bupati Mimika A. Allo Raфра, Ketua DPRD Mimika Drs. Yoseph Yopi Kilangin, dan Kapolres Mimika AKBP Godhelp C. Mansnembra. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Lantai I Ruang 215 OB I PTFI di Kuala Kencana sekitar Pukul 22.15 WIT. Juru Bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) Mindo Pangaribuan menyebutkan bagian isi surat kesepakatan yang terkait tuntutan kenaikan gaji. Isinya adalah: "Usulan Tongoi Papua mengenai upah karyawan grade terendah (F1) disetujui dalam rentang antara Rp 3.100.000 sampai dengan Rp 3.600.000 dan akan digunakan sebagai dasar perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen PTFI dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dengan memperhatikan kondisi pasar pada industri pertambangan umum di Indonesia. Dalam perundingan PKB tersebut dua orang perwakilan Tongoi Papua akan duduk di dalam Tim SPSI. Perusahaan Privatisasi dan Kontraktor akan menjadikan presentase yang disetujui dalam PKB tersebut sebagai referensi dalam perundingan PKB pada masing-masing perusahaan."

23 April

Sekitar 100-an orang mahasiswa FKIP Uncen membagi-bagikan bunga guna merayakan hari Bumi se-dunia di Jayapura.

29 April

Provinsi Papua Barat akan berupaya untuk memfasilitasi agar masyarakat Suku Besar Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni bisa menyampaikan langsung aspirasinya tentang tuntutan bagi hasil dengan LNG Tangguh ke Presiden RI. Namun, untuk bisa bertemu harus menunggu karena kegiatan presiden diatur protokoler yang ketat. "Pak Gubernur harapkan nantinya ada pertemuan lanjut dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sebyar. Presiden tidak bisa berkunjung ke daerah begitu saja, tapi diatur dengan protokoler yang ketat," tandas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat, Drs J Hegemur. Namun mengenai sejumlah tuntutan masyarakat terhadap LNG Tangguh, Kadistamben menilai ada yang tak realistis, seperti tuntutan masyarakat Sebyar berhak mendapatkan 30 % yang diperoleh Pemprov Papua Barat dari pemerintah pusat. Menurut dia, masalah pembagian hasil sudah diatur secara nasional, dan prosentase masing-masing, untuk daerah penghasil 32 %, daerah bukan penghasil 30 %, pemerintah provinsi 16 % serta sisanya menjadi bagian pemerintah pusat.

30 April

Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Yanni, meminta PT Freeport Indonesia (FI) lebih berpihak kepada kepentingan dan pengembangan masyarakat lokal dan pemerintah daerah setempat. Yanni mengatakan bahwa kehadiran PT FI yang beroperasi di Mimika sejak 1973 telah mengundang begitu banyak perhatian dan keprihatinan masyarakat khususnya di bidang keadilan dan perdamaian. "Sebagai anggota DPRP saya prihatin sejak dulu dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dilakukan penambangan emas di wilayah ini khususnya di dataran rendah Mimika yang dialiri tailing,"

9 Mei

Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan sektor minyak dan gas menjadi prioritas bagi BNI untuk dibiayai. Sigit mengatakan jika proyek migas tersebut feasible dan bankable, BNI mengucurkan kreditnya. Pada tahun ini, BNI mengalokasikan satu hingga dua triliun rupiah untuk pembiayaan sektor migas. Menurut Sigit, saat ini BNI sedang melakukan kajian proyek migas kilang liquefied natural gas (LNG) Tangguh, Papua. Pemerintah berencana mengajak perbankan dalam negeri, antara lain Bank Mandiri, BNI, dan BCA untuk ikut dalam pembiayaan LNG Tangguh.

14 Mei

Hasil Riset Co-op Insurance Society Inggris menemukan dampak buruk bagi pengembangan bio-fuel karena memicu kerusakan lingkungan sebab negara yang hendak memproduksi bio-fuel harus menyediakan lahan yang luas untuk menanam tanaman penghasil bio fuel. Jika lahan tidak cukup pemerintah atau masyarakat cenderung membuka hutan demi mendapatkan sebidang tanah.

22 Mei

Wakil Ketua I DPRD, Komaruddin Watubun, mengingatkan Pemprov agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan mengundang investor Kelapa Sawit untuk membuka lahan 1 juta hektar karena dapat membawa dampak negatif bagi Papua. Pihaknya memberikan dua alasan: [1] adanya indikasi satu perusahaan mendapatkan monopoli, [2] pembukaan perkebunan kelapa sawit jutaan hektar tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan sehebat apapun dalam 10-20 tahun.

23 Mei

Puluhan warga yang tinggal di Taman Nasional Wasur, Merauke, melakukan aksi demo damai ke Kantor Taman Nasional Wasur dan Kantor DPRD Merauke guna menuntut agar palang penggalan pasir di sekitar Ndalir dicabut agar mereka bisa mendapatkan nafkah kembali.

Kepala BPID Papua, Drs. Purnama, menanggapi kekhawatiran DPRD tentang rencana investasi lahan 1 juta hektar dengan menjelaskan bahwa lahan seluas itu tidak akan dikelola oleh satu perusahaan saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, lahan kelapa sawit yang dapat dikelola oleh satu perusahaan maksimal 200.000 hektar.

6 Juni

Tiga truk kayu ilegal ditangkap oleh Polhut BKSDA dan ini merupakan penangkapan ketiga kalinya terhadap pelaku yang sama, pengusaha Budi.

13 Juni

Anggota Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat di wilayah Merauke yang lokasinya tercemar limbah tambang emas dan tembaga Ok Tedi yang hanya berjarak 18 KM dari perbatasan Indonesia. Tambang tersebut membuang limbah di Kali Fly yang membatasi Indonesia dengan PNG.

18 Juni

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Drs. Yanuarius Resubun, mengungkapkan bahwa royalti PT Freeport Indonesia tahun 2007 yang akan diserahkan kepada Pemprov Papua sebesar Rp. 130 milyar sama dengan jumlah yang dibayar

tahun 2006. Jumlah itu tidak termasuk pembayaran ke kabupaten-kabupaten. Akan tetapi, pihaknya menilai bahwa perhitungan ini tidak transparan. Juru bicara PTFI, Mindo Panggaribuan, menyatakan bahwa hal tersebut dapat ditanyakan kepada Departemen Pertambangan dan Energi karena merupakan kewenangan pemerintah.

28 Juni

Pemerintah dikabarkan menawarkan separuh dari rencana penjualan gas alam cair (LNG) Tangguh, yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembeli di Pantai Barat Amerika Serikat, untuk "dialihkan" ke Jepang, Korea, dan negara lain, termasuk untuk kebutuhan dalam negeri. Pengalihan ini dimungkinkan karena pembangunan terminal di Pantai Barat Amerika lebih cepat daripada kilang Tangguh. Kesediaan Sempra menerima pengurangan jumlah yang akan diterimanya diimbangi dengan kompensasi yang akan diberikan oleh BP Migas. Tetapi belum jelas benar berapa besar kompensasi yang akan diterima oleh Sempra. seluruh harga jual LNG Tangguh yang berjumlah 7,5 juta ton untuk masa 20-25 tahun sangatlah murah, karena jauh berada di bawah harga jual LNG yang wajar, termasuk di bawah harga jual LNG Badak yang notabene sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kontrak ke Fujian merupakan harga yang termurah bila dibanding harga penjualan ke Pantai Barat Amerika. Meskipun diketahui bahwa harga jual ke Cina US\$ 3,35/MMBtu, sebenarnya itu merupakan harga baru setelah dilakukan renegosiasi dengan pihak Cina.

BAGIAN II

ANALISIS PERISTIWA

Dari lintasan peristiwa triwulan ini, pembaca dapat mengikuti potret dinamika sosial kemasyarakatan di Tanah Papua. Potret ini diwarnai dengan berbagai peristiwa khusus meski secara umum tidak jauh berubah dengan triwulan pertama tahun 2007. Jika pembaca secara kritis mencermati dinamika tersebut, kiranya dapat diamati bahwa setiap bidang kehidupan di Tanah Papua terpecah-belah dan berjalan masing-masing, *'Tra baku ketemu'*, begitulah orang bilang. Bidang pertahanan dan keamanan tidak bersambung dengan bidang perlindungan hak-hak warga; sementara itu bidang penyelenggaraan pemerintahan ternyata tidak menjawab perpecahan akibat pemekaran daerah yang bertentangan dengan jiwa Otonomi Khusus.

Di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, empat unsur kunci hak-hak masyarakat yang dianalisis dalam tulisan ini tampak terbagi dan terpisah: dunia layanan kesehatan tidak tersambung dengan dunia pendidikan; sebaliknya kesejahteraan rakyat tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah.

A. Apakah hak hidup orang Papua dilindungi?

Suasana umum selama triwulan kedua ini masih relatif sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Pertanyaan besar mengenai hak hidup orang Papua tetap belum terjawab. Pembaca kiranya dapat mencermati berbagai fakta yang kami catat dalam bagian kronik di atas, khususnya mengenai kebebasan warga (*civil liberties*). Nasib narapidana politik kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena tetap terkatung-katung di Makassar. Komisi A dan F DPR Papua berjuang agar mereka dikembalikan ke Papua karena selama ini mereka mengalami tindakan diskriminasi rasial di LP Makassar. Perjuangan juga dilakukan oleh jaringan LSM dan mahasiswa Papua baik yang ada di Makassar, Jakarta, maupun Jayapura agar Dirjen Lembaga Pemasyarakatan mengizinkan pengembalian mereka. Akhirnya pada tahun ini tiga orang napi dipindahkan. Jadi perjuangan dan negosiasi ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi tetapi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu saat mereka dipindahkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Sementara itu publik Wamena yang kenyang dengan sejarah kekerasan militer dan etnis kembali dikejutkan dengan munculnya laporan Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Balim Pegunungan Tengah mengenai tindak penyiksaan oleh anggota TNI yang terjadi di Kurima terhadap satu warga sipil karena alasan pencurian uang sebesar ratusan ribu rupiah. Kiranya sulit diterima dengan akal sehat bahwa seorang yang dituduh pencuri diperlakukan sebagai semena-mena seakan-akan dia bukan manusia. Dia dipaksa mengalami tindak penganiayaan berat yang keji dan di luar perikemanusiaan sehingga mengalami luka fisik dan mental yang berat. Laporan ini seakan mengingatkan kembali deretan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya penyiksaan oleh TNI, yang tak kunjung ditangani dan diajukan ke muka hukum.

Di tengah segala kegaulan ini, Utusan Khusus Sekjen PBB urusan Pembela HAM, Ibu Hina Jilani, diizinkan berkunjung selama 1 hari di Papua. Kunjungan kilat ini merupakan kesempatan yang sudah dinantikannya selama tiga tahun lebih. Dalam lawatan ini sebagian besar waktu disita oleh kalangan pemerintah dan militer mengingat dia

pertama-tama adalah tamu negara. Kunjungan ini amat bersejarah mengingat ini merupakan kunjungan pejabat tinggi PBB di bidang HAM sejak tahun 1969. Tak heran bahwa banyak pihak menaruh harapan tinggi agar terjadi perubahan di bidang perlindungan terhadap para pekerja HAM di Papua. Dalam kunjungan ini terjadi satu insiden kecil bahwa mobil SKP diserempet oleh mobil seorang yang mengaku sebagai komandan intel Kodam Trikora. Di dalam mobil terdapat staf SKP Jayapura dan SKP Merauke yang baru saja tiba dari pertemuan dengan Utusan Khusus tersebut di Jakarta. Timbul pertanyaan apakah kejadian ini murni kecelakaan atau kesengajaan? Apakah mungkin seorang pejabat tinggi militer memiliki sopir yang kurang cekatan dan trampil sehingga harus menyerempet kendaraan lain dalam keadaan yang tidak terjepit?

Pasca kunjungan Utusan Khusus, ternyata dua tokoh pejuang HAM mengalami teror terus menerus: Bpk. Yan Christian Warinussy dan Bpk. Albert Rumbekwan. Teror itu datang melalui pesan SMS, pembuntutan, dan pesan-pesan ancaman dengan mendatangi kantor yang bersangkutan. Keadaan ini telah dilaporkan kepada Utusan Khusus dan mendapat perhatian serius dari pihaknya.

Kunjungan Utusan Khusus ternyata diperalat oleh sejumlah pihak untuk melemparkan tanggung jawab penanganan soal pelanggaran HAM. Melalui corong media massa lokal, pihak ini mengatakan kepada masyarakat bahwa pejabat PBB ini harus menyelesaikan soal-soal HAM di Papua padahal pasal 28 I ayat 4 Amandemen Kedua UUD 1945 tegas-tegas mengatakan bahwa pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tugas negara. Karena itu FOKER LSM Papua tak henti-hentinya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal ini dan juga Utusan Khusus sendiri. Pada akhir lawatan dia memberikan pernyataan pers resmi yang menegaskan penghargaannya kepada pemerintah atas kerjasama yang baik sekaligus catatan bahwa para pekerja HAM di Indonesia belum dijamin keselamatannya oleh negara.

Di sisi lain, kami mencatat bahwa para korban pelanggaran berat HAM di Kimaam dan Wasior tetap menantikan upaya penyelesaian masalah secara menyeluruh. Kaum korban ini belum melihat titik terang dari berkas kasus yang sudah ada di tangan KOMNAS HAM di Jakarta bersama beberapa berkas lain yang sudah diselidiki oleh badan ini. Namun demikian, hingga hari ini tidak ada kabar berita bahwa berkas tersebut entah sudah dilanjutkan ke Kejaksaan Agung atau ditangani melalui mediasi lain karena jalan hukum formal buntu. Ketidakpastian dan penantian menjadikan keluarga korban makin marah dan memendam api dendam yang dapat menjadi pemicu tindakan balasan.

B. Mengontrol dan mengawasi

Wacana pertahanan dan keamanan sebenarnya terus didominasi oleh wacana kontrol dalam negeri alias terhadap rakyat sendiri. Perintah konstitusi untuk melindungi rakyat tampaknya diterjemahkan secara berbeda oleh instansi pertahanan dan keamanan seperti dilihat dari cara bersikap dan bertindak aparat keamanan dan aparat pertahanan kita. Di tingkat Jayapura, Danrem Kol. Burhanuddin Siagian mencuat ke muka publik karena pernyataan dan tindakannya yang menggebrak dan patut dicermati. Pernyataan bahwa 'para pengkhianat negara harus ditumpas' mengingatkan kita akan suasana perang kemerdekaan tahun-tahun 1940-an. Pertanyaannya adalah apakah kita dalam suasana perang? Apakah kita sedang menghadapi musuh di depan mata sehingga perlu memakai bahasa-bahasa perang? Selain itu jika memang diketahui ada pihak yang dikategorikan sebagai 'pengkhianat negara', bukankah polisi wajib menindaknya?

Deretan pertanyaan ini kiranya menyiratkan suasana yang (hendak) diciptakan oleh Danrem yang notabene masuk dalam daftar tersangka penjahat perang Timor Leste oleh PBB. Apakah ada kaitan langsung antara catatan kinerjanya di Timor Leste dengan pernyataannya sekarang ini di Papua? Ataukah ini serba kebetulan?

Sementara itu BIN berusaha dengan gigih agar mendapat kewenangan dan dana lebih besar dari negara untuk melakukan operasi intelijen di Papua. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPR RI, BIN mendapat dukungan untuk mengadakan operasi intelijen yang lebih luas. Persetujuan ini mendatangkan tanda tanya sekaligus kecemasan di kalangan masyarakat Papua. Ada apa di Papua? Apa yang terjadi sebenarnya? Ada bahaya apa bagi kami, orang Papua sehingga harus ada operasi intelijen yang lebih besar? Apakah gerakan aspirasi M sudah sedemikian hebat dan bersenjata lengkap sehingga dinas-dinas intelijen dan TNI harus bekerja mati-matian untuk menanganinya? Semuanya pertanyaan ini terus mengisi keseharian hidup orang Papua terutama kaum korban yang tersebar di Tanah ini.

Sementara itu jika dilihat dari dekat aspirasi M dengan berbagai ekspresi tetap ada meski gaungnya tidak dapat dibandingkan dengan keadaan lima tahun lalu. Ekspresi ini lebih banyak disuarakan di luar Indonesia oleh para aktivis politik Papua yang kemudian berdampak ke dalam negeri. Di dalam negeri masalah ini mencuat kembali di sekitar tgl. 1 Juli dimana sejumlah aktor seperti Narapidana politik, Kapolda, sejumlah tokoh menegaskan agar tidak mengibarkan bendera sebagai peringatan hari jadi OPM. Hal ini menarik dicermati karena selama lima tahun terakhir, jarang sekali media menyebut 1 Juli sebagai hari jadi OPM. Lalu mengapa tiba-tiba muncul kalimat semacam ini di media yang menjadi bola api liar yang membakar berbagai pihak untuk berpolemik? Apakah ini memang wacana yang hidup di tengah masyarakat ataukah ini produk media belaka?

Gaung itu juga sejenak muncul saat ada rencana kunjungan salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Eni Faleomavaega, ke Papua. Rencana ini tiba-tiba bertiup ke Papua dan menjadi bahan polemik di media. Berbagai politisi dan pejabat baik di Jayapura maupun Jakarta sibuk menanggapi. Sebenarnya patut menjadi pertanyaan kita: siapakah orang yang tiba-tiba ditokohkan ini? Apakah benar dia memang 'mengancam' kedaulatan negara? Jika benar, mengapa dia bisa masuk ke Indonesia dan diterima oleh pejabat tinggi negara?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan jelas, kiranya masyarakat dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya jika kita perhadapkan antara kebijakan pertahanan dan perlindungan HAM, muncul pertanyaan apakah kebijakan pertahanan dan keamanan menjawab kebutuhan—dan bahkan perintah UUD 1945 — untuk melindungi rakyat?

C. Pemerintah-pemerintah jalan masing-masing

Dalam tiga bulan ini, fokus perhatian pemerintah-pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota adalah penyusunan RAPBD yang merupakan tuntutan administrasi pemerintahan. Dari catatan SKP, terdapat sejumlah kabupaten yang terlambat dan cepat-cepat mengirim RAPBD ke Departemen Dalam Negeri. Fakta ini menunjuk pada tingkat kemampuan birokrasi untuk merancang pendapatan dan pengeluaran yang ada di wilayah pemerintahannya. Ada pemerintah yang ternyata tidak mampu menyusun anggaran daerahnya pada waktunya sehingga terancam terkena sanksi dari Depdagri seperti Waropen dan Supiori. Ketidakmampuan ini menandakan apa? Apakah ini

sebuah kebetulan bagi kabupaten baru yang sedang mulai menata diri? Ataukah ini merupakan penanda bahwa pemekaran kabupaten tak diiringi kemampuan birokrasi yang berkualitas untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan? Pertanyaan masih dapat diperpanjang. *De facto*, Waropen dan Supiori tidak berhasil menepati batas akhir penyerahan RAPBD dan terancam terkena sanksi pemotongan DAU. Karena itu pemkab yang bersangkutan amat sibuk melobi Depdagri agar kesalahan ini diampuni.

Meski kabupaten pemekaran terbukti tidak mampu, wacana pemekaran tetap ramai. Hiruk pikuk pro dan kontra terus menghiasi halaman demi halaman surat-surat kabar di Jayapura dan berbagai kota di Papua. Argumen yang terus berdentung adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan¹. Argumen ini ternyata berhadapan dengan fakta keras di lapangan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merosot saat suatu wilayah pemerintahan dimekarkan. Selain itu bukan rahasia lagi, bahwa gerakan pemekaran amat berkaitan dengan jual beli suara di DPR Pusat, ambisi pejabat daerah yang tidak bisa lagi menduduki kursi pejabat karena adanya batas masa kepemimpinan, pemanfaatan massa mengambang, dan pertarungan kekuasaan di antara elit politik lokal. Fakta lain yang kami catat adalah pernyataan Kepala Dinas Departemen Agama Provinsi Papua yang menyatakan bahwa di 11 kabupaten pemekaran belum ada kantor departemen agama. Jadi selain soal RAPB, layanan pemerintah, dan IPM, ternyata prasarana fisikpun di sebagian wilayah belum tersedia.

Salah satu contoh adalah pemekaran kabupaten Grime-Nawa dari Kabupaten Jayapura yang mendapat tentangan keras dari masyarakat Adat Yokari di wilayah tersebut. Sebagian besar masyarakat yang hendak dimekarkan tidak setuju bahkan dengan keras mendesak DPRD Kabupaten Jayapura dan Bupati Jayapura untuk membatalkan rencana itu. Alasannya adalah mereka tidak pernah diajak bicara. Alasan ini kelihatan sederhana tetapi sangat mendasar karena berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan mekanisme konsultasi publik yang amat kunci dalam sistem demokrasi dimanapun. Untunglah, pada akhirnya protes ini diakomodir. Dinamika pro dan kontra kasus ini menarik dicermati. Pembaca dapat menangkap sikap akomodatif dari saluran-saluran politik yang ada setelah ada rangkaian demo-demo oleh masyarakat adat.

Contoh lain di tingkat provinsi adalah Provinsi Papua Selatan. Gerakan pemekaran ini makin gencar dilakukan Pemda Merauke dan mendapat dukungan dari Asmat, Mappi, dan Boven Digul. Upaya lobi di tingkat nasional juga gencar dilakukan meski tanggapan dari DPR Papua dan Gubernur Papua dingin saja. Ambisi ini sudah sejak gubernur terdahulu mengemuka dan secara eksplisit digerakkan oleh Pemkab Merauke. Dalam tulisannya di harian *Cenderawasih Pos*, 5 April 2007, Bupati Gluba Gebze kembali memakai argumen 'memperpendek rentang kendali' dalam memperjuangkan aspirasi pemekaran tersebut sementara Wabub Maryoto menjadi ujung tombak tim pemekaran yang mendapat dukungan kuat dari paguyuban-paguyuban etnis pendatang.

Yang mengejutkan adalah bahwa pihak DPRD Kabupaten Merauke pada tgl. 28 April 2007 mengeluarkan SK Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang mencakup empat kabupaten: Boven Digul, Asmat, Mappi, dan Merauke. Kiranya kita patut bertanya apakah sah satu DPRD mengeluarkan SK untuk empat kabupaten di luar wilayah administrasinya? Selain itu, apakah DPR tingkat kabupaten memiliki kewenangan untuk

¹ John Gluba Gebze, "Pemekaran Provinsi Papua Selatan" dalam: *Cenderawasih Pos*, 5 April 2007.

memekarkan wilayah dengan status lebih tinggi seperti provinsi? Yang menarik dicermati adalah kenyataan bahwa upaya menentang arus pemekaran ini selalu ditentang secara keras oleh pihak Pemkab Merauke sehingga LMA Malind Anim yang merepresentasikan masyarakat pemilik hak ulayat Merauke mengalami perlawanan dan tekanan mental dan fisik yang tidak main-main.

Berbeda dengan upaya pemekaran Grime Nawa, pemekaran Papua Selatan tidak diakomodir oleh saluran politik Papua. Argumentasinya jelas bahwa proses tersebut harus diletakkan dalam mekanisme hukum dan politik Otsus. Rupanya mekanisme ini kurang memberi saluran sehingga aspirasi itu langsung dilemparkan ke Jakarta seperti terjadi selama ini. Di Jakarta, perundingan-perundingan politik ini pasti sarat kepentingan petinggi politik Jakarta, jaringan bisnis, dan kepentingan partai-partai besar yang ingin menjamin kelangsungan jaringan kekuasaannya.

Pembaca tentu paham bahwa Merauke dan kabupaten sekitarnya memiliki potensi besar untuk lahan kelapa sawit, pohon jarak, dan tanaman ekonomis lainnya. Tak heran jika potensi ini menarik minat investor. Selain itu, tiga kabupaten di wilayah ini tergolong baru sehingga ketergantungan dana ke pusat (DAU) relatif tinggi dibandingkan kabupaten lama di Papua. Ada unsur lain juga yang kiranya main peran, yakni representasi orang Papua Selatan dalam jajaran pemerintahan Papua. Unsur-unsur ini semua kiranya memainkan peran kunci dalam hiruk pikuk gerakan pemekaran provinsi Papua Selatan.

Kenyataan gerakan pemekaran di luar mekanisme Otsus makin hari makin mengubur dalam-dalam hakikat Otsus yang hendak membalik kiblat pemerintahan dari atas ke bawah menjadi bawah ke atas. Gerakan pembalikan ini sudah tidak dipedulikan lagi dan tinggal uang saja yang diperebutkan dengan gigih oleh pihak manapun. Lebih dari itu makin menjadi pertanyaan kita semua tentang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pemekaran itu? Menjamurnya kantor-kantor pemerintah di kabupaten-kabupaten baru ternyata tidak diiringi dengan kehadiran layanan pemerintah yang makin maju dan efisien. Orang kampung lebih sering melihat kantor-kantor itu kosong atau tutup. Pemerintah jalan sendiri; rakyat jalan sendiri!

Cerita mengenai bidang pemerintahan kiranya belum lengkap jika kita belum menyentuh wabah korupsi. Dalam triwulan kedua ini, tercatat beberapa kasus dugaan korupsi mencuat di Wamena, Waropen, dan Puncak Jaya. Di Wamena, dampak dari penanganan kasus korupsi mantan Bupati David Hubi merembet ke beberapa mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004. Polda siap mengusut tetapi sejumlah politisi yang sekaligus pejabat pemerintah menentanginya secara terang-terangan melalui media massa lokal dengan alasan bahwa pengusutan itu hanyalah upaya politis untuk menjatuhkan mereka. Di Waropen, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Germowar mengadakan advokasi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Waropen sebesar Rp. 11 milyar lebih. Mereka menuntut agar kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara itu ICW yang gigih memerangi korupsi melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat oleh Pemkab Puncak Jaya dan PT Air Regional senilai Rp. 12 milyar ke KPK.

Inilah wajah pemerintah-pemerintah kita yang lebih berorientasi kepada kekuasaan daripada kepada kesejahteraan rakyat. Bagian ini masih akan bersambung dengan uraian mengenai parahnya kesejahteraan rakyat di bawah ini.

D. Konflik tak tertangani

Pembaca dapat mengamati bahwa konflik yang terjadi selama triwulan kedua ini terjadi karena beberapa sebab dan di bidang yang berbeda. Ada yang disebabkan oleh pertentangan antar pengurus intern Gereja seperti terjadi pada Gereja Kingmi. Ada pula karena sengketa pilkada seperti yang terjadi di Puncak Jaya dan Kota Sorong. Ada pula karena perang antar suku/ marga seperti di Timika. Singkatnya konflik yang terjadi ternyata tidak tunggal dan menyentuh lapisan masyarakat yang berbeda dengan dampak yang berbeda pula.

Konflik ini berskala lokal tetapi langsung mengganggu dan tak jarang merusak kerekatan sosial antar warga. Kekekabatan dan ikatan sosial menjadi patah justru karena hal-hal yang langsung dialami di tingkat keseharian. Konflik antar pengurus Gereja Kingmi dan perang suku di Kwamki, Timika, berdampak jauh lebih dalam daripada sengketa akibat Pilkada. Yang terakhir ini akan bertahan beberapa bulan dan masyarakat kebanyakan toh akan lupa. Mereka yang sibuk adalah lingkaran kekuasaan yang menjadi pendukung pihak yang bersengketa.

Konflik pilkada yang paling mencolok pada triwulan kedua ini adalah Pilkada Puncak Jaya yang dimenangkan oleh pasangan Lukas Enembe dan Henock Ibo. Seperti halnya pilkada lain di Papua dan di seluruh Indonesia, hasil akhir perhitungan suara KPUD digugat dan dianggap tidak sah oleh salah satu pasangan. Sengketa ini disalurkan ke jalur pengadilan dan pastilah bermuara pada menang atau kalah. Kembali masyarakat terpecah antara pihak menang yang sekarang berkuasa dan pihak kalah yang disingkirkan dari panggung kekuasaan setempat.

Adapun konflik gereja dan adat tidak pertama-tama terkait pada kekuasaan politis tetapi dengan identitas. Konflik di tingkat ini jauh lebih keras dan menyakitkan karena yang dipertaruhkan adalah soal eksistensi sebagai kelompok tertentu entah gereja entah suku. Karena itu tak heran bahwa jalannya konflik ini panjang dan membesar. Pembaca dapat mengamati sendiri betapa konflik yang berada di lingkungan Gereja GKII/ KINGMI berawal di dalam dan kemudian membesar dan melibatkan banyak aktor. Kedua belah pihak saling menggugat di pengadilan yang mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat sendiri. Sengketa ini kiranya masih akan berjalan lama karena belum ada titik temu atau titik terang menuju kesepakatan.

Konflik etnis dicatat terjadi di Nabire dan Kwamki, Timika. Konflik di Nabire terjadi dari sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang mencurigakan. Korban adalah orang Moni dan penabrak adalah orang Me. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda tabrakan pada tubuh korban sehingga ada dugaan kuat bahwa korban sudah mati dan dibuang ke jalan. Namun demikian, upaya pengusutan belum berjalan, massa Moni sudah mengamuk dan menyerang komunitas Mee di Nabire yang segera membalas. Kekerasan massal pecah dan sulit dikendalikan hingga akhirnya disepakati "bayar kepala" sebagai penyelesaian. Di sini menjadi jelas bahwa mekanisme hukum formal tidak mampu menampung dan menyelesaikan kekerasan massal yang bersifat tradisional.

Kwamki dikenal oleh media sebagai salah satu titik rawan perang marga. Wilayah yang menjadi kantong arus urbanisasi orang pegunungan ke Timika itu seakan-akan tak pernah lepas dari sengketa suku, marga, atau fam. Konflik yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya menguras tenaga, biaya, dan korban jiwa. Syukurlah, pada triwulan ini dicatat pihak-pihak yang bertikai mengadakan "upacara bakar batu" sebagai tanda

pemulihan hubungan kekerabatan di antara pihak yang bertikai. Namun demikian, tetap tersisa satu pertanyaan: sampai kapan proses pemulihan hubungan ini bertahan? Apakah ada pihak-pihak yang dapat menjaga proses pemulihan ini agar tercapai kemajuan yang berarti.

Menghadapi berbagai kenyataan di atas, perlulah kita melihat bagaimana metode dan strategi pemerintah setempat dalam menghadapi konflik yang bersifat eksistensial ini? Dari pengalaman konflik Timika yang sudah berkepanjangan dan konflik Nabire, pemerintah terlihat gagap menanggapi persoalan konflik adat. Polisi dikedepankan yang berarti penindakan hukum diutamakan; sementara pendekatan kesejahteraan dan antropologis yang bersifat jangka panjang kurang ditangani. Hal serupa juga dapat kita amati dari sengketa internal Gereja Kingmi. Kedua pihak berkeras memakai jalur hukum dan gagal mencoba memakai jalan mediasi tripartit yang mungkin lebih menampung kemungkinan-kemungkinan akan jalan keluar baru. Metode 'pengadilan' amat kaku: 'menang versus kalah' atau 'benar versus salah'.

E. Parahnya tingkat kesejahteraan rakyat

Kesejahteraan rakyat? Siapa peduli? Tataran dan capaian kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari berbagai keluhan sehari-hari yang tercermin di media massa atau menjadi protes massal. SKP mencatat bahwa persoalan BBM, listrik mati hidup, air bersih tidak lancar, masalah sampah Jayapura, bencana banjir di Keerom, merupakan cerminan kenyataan sehari-hari yang makin biasa dialami di berbagai tempat di Papua. Wilayah perkotaan yang makin kotor, tak teratur, fasilitas umum yang tak berfungsi—merupakan gambaran yang makin jamak dijumpai.

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk Papua, sebenarnya perbandingan antara lahan hunian dan jumlah penduduk Papua tidak sebanding. Lahan yang dapat dihuni amat luas tetapi penduduk memadati wilayah perkotaan yang senyatanya tidak mampu menanggung tekanan kependudukan dengan segala macam tuntutan kebutuhan dasar sebuah komunitas kota seperti listrik, air bersih, pengolahan sampah, transportasi, sarana rekreasi dan hiburan, selain soal sembako.

Secara khusus situasi memprihatinkan tetap terlihat di sektor layanan kesehatan dan pendidikan. Meski terus menjadi sarana kampanye berbagai dinas/ instansi pemerintah, LSM-LSM, bahkan lembaga-lembaga dunia yang ada di Papua, tampaknya tidak mengalami kemajuan yang berarti, mandeg atau bahkan mundur. Media massa di Papua makin sering melaporkan guru-guru mogok atau demo karena memperjuangkan status kesejahteraan mereka. Seakan-akan tidak ada dana tersedia bagi mereka padahal dana Otsus makin besar dari tahun ke tahun dan UU Otsus mengharuskan Pemprov mengalokasikan 15% dari APBD untuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Di Wamena hal ini kembali terjadi demo guru padahal Sekda Chris Wopari pada 7 Mei 2007² melaporkan bahwa alokasi anggaran untuk Dinas P dan K Jayawijaya adalah yang tertinggi sebesar Rp. 112 milyar lebih. Kemana larinya uang ini?

Hal serupa juga terjadi di Okaba dan Kimaam (Kabupaten Merauke) dimana sekolah-sekolah dilaporkan lumpuh. Demo tidak hanya terjadi oleh guru tetapi juga oleh mahasiswa seperti USTJ di Jayapura yang menuntut layanan pendidikan tinggi yang

² Lihat di bagian lintasan peristiwa di atas bagian I. C. Penyelenggaran Pemerintahan.

lebih profesional. Bukan rahasia lagi bahwa ketersediaan dosen, perpustakaan, laboratorium, dan piranti pendidikan lainnya dirasakan langka bahkan di Jayapura sekalipun. Namun di sisi lain, ada kecenderungan di kalangan swasta dan pemerintah untuk mendirikan sekolah tinggi di beberapa kota lain. Pertanyaannya adalah apakah mutunya dapat terkontrol dan bersaing dengan lembaga serupa di bagian lain di Indonesia?

Situasi memprihatinkan juga terjadi di bidang layanan kesehatan masyarakat. Tingkat penyebaran HIV/ AIDS makin luas tetapi terkesan masyarakat tidak pusing juga. Lembaga peduli AIDS bermunculan dan amat aktif berkampanye di bawah koordinasi KPAD tetapi terkesan belum ada dampak nyata dari segi mengubah kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Tetap tersisa satu pertanyaan: mengapa kesadaran kritis masyarakat tidak tersentuh dengan segala kampanye dan sosialisasi? Apakah ini soal metode yang tidak tepat, masyarakat yang *malas tahu*, penyuluhan yang membosankan atau faktor lainnya?

Selain penyakit mutakhir yang ganas ini, penyakit sosial seperti alkoholisme juga makin mewabah. Berbagai penyuluhan anti miras, operasi anti miras, razia orang mabuk, kelompok doa anti miras, terus berupaya menekan tingkat alkoholisme. Akan tetapi, terkesan juga bahwa kita kurang melihat efek jera dari masyarakat. Premanisme, kriminalitas, KDRT, terus menghiasi koran-koran lokal kita dan keseharian kita yang disinyalir amat terkait dengan pengaruh miras tersebut. Perdagangan miras tidak bisa dilepaskan dari PAD dan ini berarti kita bicara mengenai perselingkuhan antara kuasa dan modal. Kita bisa mengisi sendiri siapa yang memiliki kuasa dan siapa yang memegang kendali modal. Selama perkara ini tidak disentuh, kiranya razia orang mabuk hanya menangani ekor masalah sementara distribusi miras sebagai hasil perselingkuhan dua faktor tadi tetap tak tersentuh jerat hukum. Wilayah-wilayah pengambilan keputusan politik kerap kali luput dari perhatian publik dan demo-dempun tak ubahnya sebagai riak-riak kecil yang menghantam karang.

Kiranya rakyat dan terutama kalangan menengah yang terdidik dan terlebih konsumen miras perlu lebih kritis dengan segala akibat alkoholisme bagi kesehatan dan psikologi massa di Papua. Para pengambil kebijakan kiranya perlu berpikir kembali apakah pecandu miras hendak digolongkan sebagai 'penjahat' atau 'pasien'. Dua kategori ini akan menentukan tindakan lanjutan di tingkat kebijakan lainnya: penegakan hukum, ekonomi, dan kesehatan. Selama ini para pecandu dikategorikan penjahat sehingga ditindak oleh polisi sementara kondisi kesehatannya tidak terurus. Di berbagai negara maju, pecandu digolongkan sebagai pasien sehingga disediakan klinik rehabilitasi, program-program pemulihan, dsb. Apakah ini saatnya kita mengubah konsep pemahaman kita akan pecandu miras?

Penutup: *tra baku ketemu*, jalan masing-masing

Dari uraian di atas pembaca kiranya dapat mengikuti betapa dunia kita ini terkotak-kotak, *tra baku ketemu*, dan jalan masing-masing. Satu jalan ke utara, lain ke selatan. Pemerintah jalan sendiri, aparat keamanan ikut mereka punya mau dan masyarakat tinggal sendirian. Perasaan ditinggalkan ini akan amat kuat dirasakan jika kita mengamati tingkat kesejahteraan masyarakat dan perasaan aman masyarakat.

Semakin hari, semakin nyata bahwa tanpa demo kita tidak mendapatkan hak kita. Tanpa memaksa kita tidak dilindungi dan dihargai sebagai manusia bahkan dengan

protes sekalipun, hak kita belum tentu diperoleh. Kiranya gambaran ini tidak amat berbeda dengan triwulan pertama dan masih akan kita ikuti pada triwulan berikut sehingga pada akhir tahun kita dapat memiliki gambaran umum yang mengarah pada prediksi kita tahun depan yang akan lebih diwarnai hiruk pikuk penggalangan massa menuju Pemilu 2009.